

2023



SYAIRANI KOMP. PERKANTORAN GAGAS TELP./FAX. (0512) 21155



LAPORAN KINERJA

BAKESBANGPOL
KABUPATEN TANAH LAUT



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan linerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feed back) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik “Good Governance” di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut,



MOHAMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP.19790629 200003 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2018- 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Tanah Laut yang demokratis, tentram, aman dan damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani visi, misi, tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Tanah Laut.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator Persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dari target 100% tercapai peningkatan sebesar 9,09%.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada indikator pertama yaitu Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat di Tanah Laut dengan target 100% tercapai lebih dari 100%
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target 100% tercapai 121%
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya pada indikator persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya target 100% tercapai 30%.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik dari target 100% tercapai 100%.

Demikianlah ringkasan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, yang tentunya ke depan menjadi perhatian kami untuk penyempurnaan penerapan LKj, khususnya pengembangan sistem pengumpulan data dan perangkat kerjanya.

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



MOHAMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP.19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Cascading Kinerja	4
D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	5
E. Isu Strategis	15
F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	15
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	21
H. Sistematisasi Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	25
A. Visi RPJMD	25
B. Misi RPJMD.....	25
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
1. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	32
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	51
C. Upaya Perbaikan Untuk Kinerja yang Akan Datang.....	52
2. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	53
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023	53
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	59
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai.....	5
Tabel 1.2 Kualifikasi Pendidikan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural	17
Tabel 1.5 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya.....	17
Tabel 1.6 Rincian Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2023	19
Tabel 1.7 Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2023.....	19
Tabel 1.8 Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Sebelumnya	21
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 3.2 Capaian IKU Bakesbangpol Tahun 2023.....	33
Tabel 3.3 Daftar Konflik Tahun 2023.....	34
Tabel 3.4 Perbandingan dari Tahun ke Tahun	34
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Sesuai Misi.....	49
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Tahun Sebelumnya	51
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2023.....	53
Tabel 3.8 Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.....	54
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	59
Tabel 3.10 Ringkasan APBD Tahun 2022 terhadap Tahun 2023	60
Tabel 3.11 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 2022 dan 2023	61
Tabel 3.12 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	66
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja 2022 dan 2023	66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Cascading Kinerja	4
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis.....	5
Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi.....	13
Gambar 2.1 Aplikasi SILAPOR-Ormas.....	31
Gambar 3.1 Pj. Bupati Tala bersama Pengurus FKUB	37
Gambar 3.2 Mediasi Pendirian Rumah Ibadat HKI	38
Gambar 3.3 Mediasi Pendirian Rumah Ibadat Katolik di Bati-Bati.....	39
Gambar 3.4 Mediasi Pendirian Rumah Ibadat Katolik di Bati-Bati.....	39
Gambar 3.5 Mediasi antara Warga dan Umat Salabi di Kelurahan Pabahanan	40
Gambar 3.6 Mediasi Sengketa Taman Permana Desa Telaga.....	46
Gambar 3.7 Koordinasi Sengketa Cetak Lahan Sawah.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pelayanan publik dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan Anggaran yang dialokasikan kepada Bupati, dapat dilaksanakan.

Maka dengan adanya regulasi ini Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah berupaya untuk menyusun Laporan Kinerja untuk tahun 2023. Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi

saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan yaitu nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- b. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya

- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 kepada Bupati Tanah Laut.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

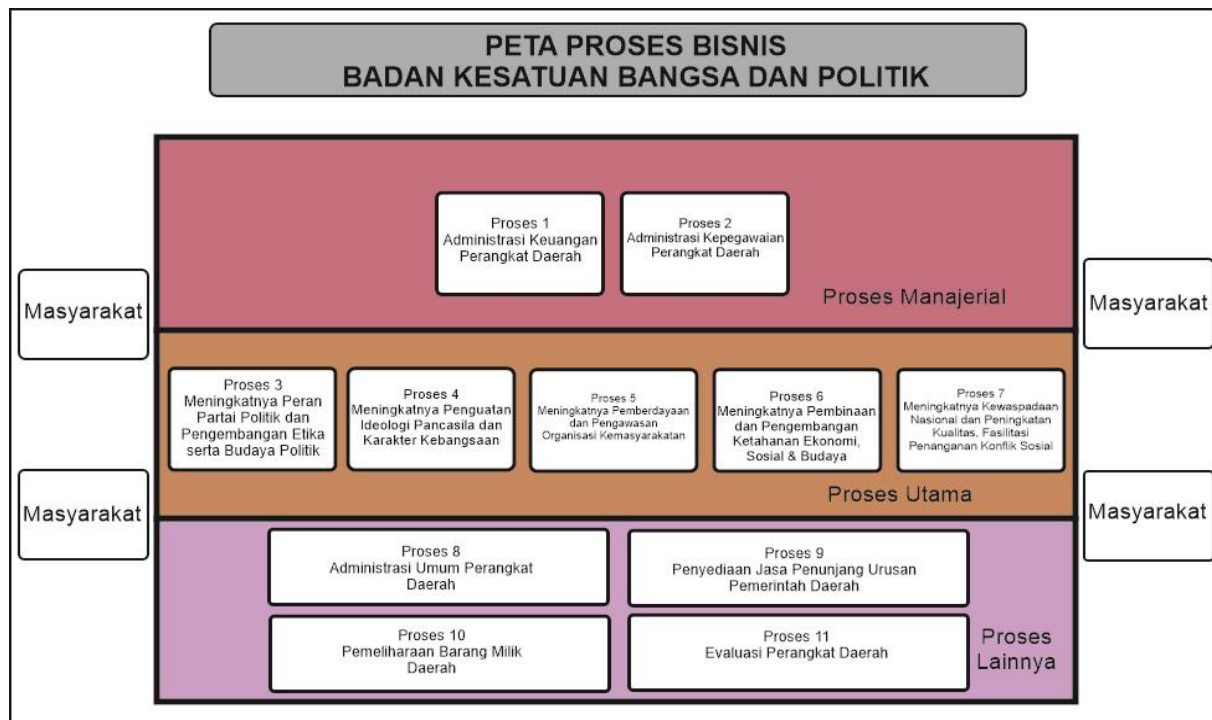
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Cascading Kinerja

CASCADING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT					
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT					
TUJUAN - TERJAGANYA STABILITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT					
Indikator : Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani					
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	KEPALA BIDANG POLITIK	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	SEKRETARIS	
Sasaran 1 - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Indikator : 1.1 Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	Sasaran 2 - Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Indikator : 2.1 Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Sasaran 3 - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Indikator : 3.1 Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	Sasaran 4 - Meningkatkan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 4.1 Persentase Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sasaran 5 - Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator : 5.2 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sasaran 6 - Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD 6.1 Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan Kepegawaian 6.2 Persentase perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 6.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	
				KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				6.4 Melaksanakan pengusunan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD 6.4.1 Dokumen Kinerja sesuai ketentuan 6.5 Mengusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD 6.5.1 Dokumen Pelaporan yang disusun 6.5.2 Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	6.6 Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran 6.6.1 Aset yang diadukan di lingkungan Bakesbangpol Kab. Tanah Laut 6.7 Menginput data kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian 6.7.1 Dokumentasi Data dan Layanan surat menurut 6.7.2 Pegawai yang administrasi kepegawaian dilakukan secara tertib 6.8 Menginventarisir Peningkatan Kapasitas SDM 6.8.1 ASN yang mengikuti Pelatihan/Elmtek

D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

1. Proses Bisnis



2. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber dayam manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

1.1 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;

- i.* Menyiapkan bahan penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j.* Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k.* Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l.* Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m.* Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n.* Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a.* Membuat rencana dan program kerja sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b.* Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c.* Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- d.* Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e.* Melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f.* Mengendalikan arsip aktif;
- g.* Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h.* Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i.* Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;

- j. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. Mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- m. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kanupaten Tanah Laut di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

- pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

4) Bidang Politik

Bidang Politik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan

fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

5) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka

pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan:

6) Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara ;

- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional ;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik ;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan silitasi pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugaas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

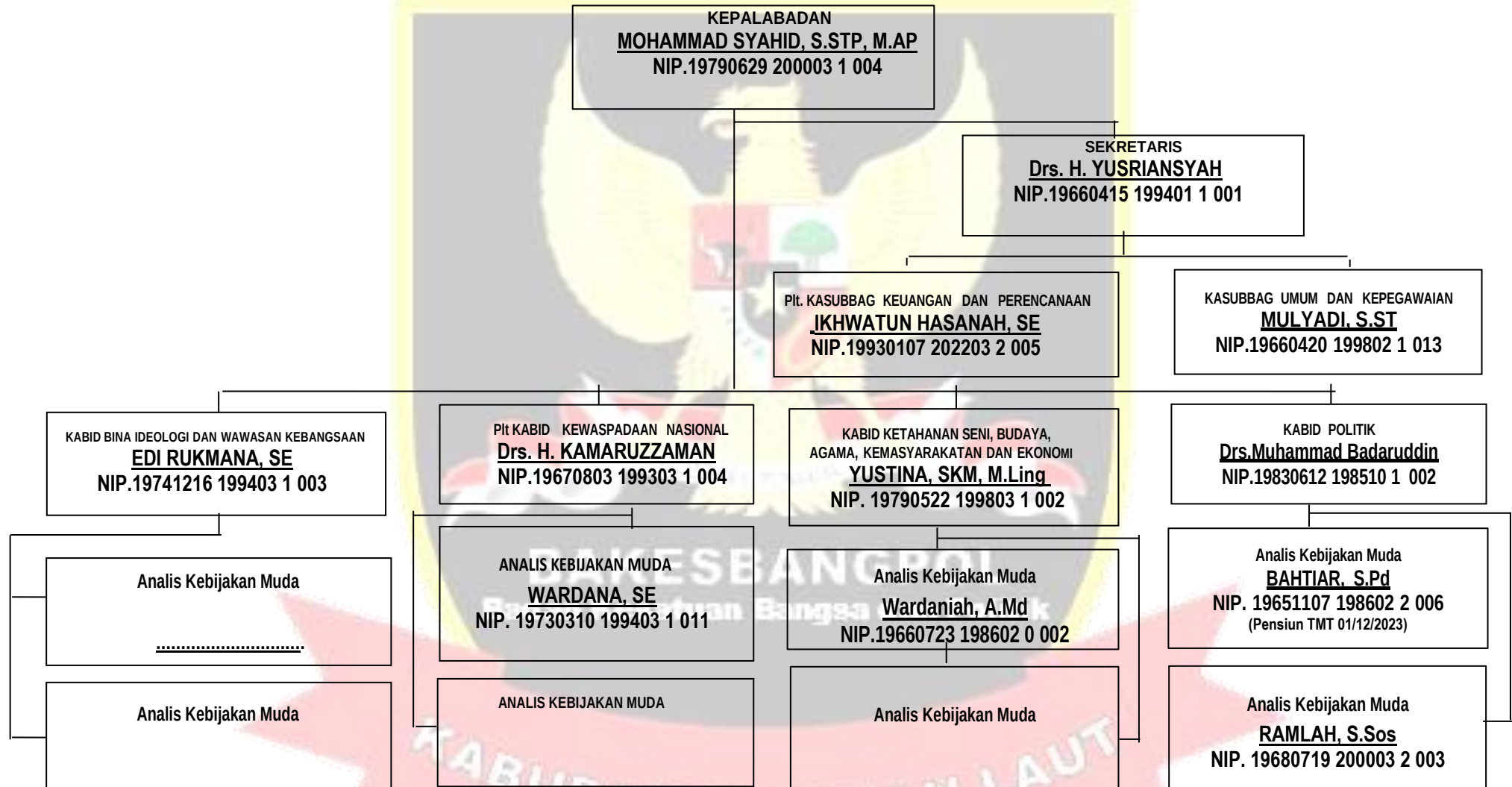
7) Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian keuangan dan perencanaan
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Bidang Kewaspadaan Nasional
- c. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
- d. Bidang Politik:
- e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2023**



E. ISU STRATEGIS

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target dan sasaran guna meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang dikembangkan adalah :

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam;
2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat;
3. Penguatan kerukunan antar umat beragama;
4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Jumlah pegawai ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 26 Orang (Dua Puluh Enam) orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Kepala Sub Bidang	0 Orang
6.	Fungsional Tertentu	1 orang
7.	Staf	18 Orang
	Jumlah	26 Orang

Tabel 1.2

Kualifikasi Pendidikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
	SD	0	0	0
	SMP	2	0	2
	SMA	4	0	4
	D3	3	0	3
	S1	14	0	14
	S2	3	0	3
	Jumlah	26	0	26

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	0 orang
2.	Pembina TK. I	IV/b	1 orang
3.	Pembina	IV/a	2 Orang
4.	Penata TK. I	III/d	11 Orang
5.	Penata	III/c	1 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	1 Orang
7.	Penata Muda	III/a	4 Orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	3 Orang
9.	Pengatur	II/c	1 Orang
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	1 Orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
12.	Juru TK. I	I/d	
13.	Juru	I/c	
14.	Juru Muda Tk. I	I/b	
	Jumlah	-	26 Orang

Adapun jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Lautdapat

(LKj) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Kesbangpol	1 Orang	-
2.	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	4 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang	-
5.	Kepala Sub Bidang	-	-
6.	Pejabat fungsional Tertentu		1 Orang
7.	Pejabat fungsional umum	-	18 Orang
	Jumlah	7 Orang	19 Orang

Dalam rangka mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.5

Tabel 1.5

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Meja Kerja	25 unit	Baik
2	Meja Kerja pejabat	10 unit	Baik
3	Meja Rapat	6 unit	Baik
4	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
5	Kursi Tamu	3 set	Baik
6	Kursi Rapat	16 unit	Baik
7	Kursi Putar	33 unit	Baik
8	Lemari Es	3 unit	Baik
9	Lemari Arsip	2 unit	Baik
10	Lemari Sorok	1 unit	Baik
11	Lemari Kaca	1 unit	Baik
12	Lemari Besi	10 unit	Baik
13	Komputer/ PC	14 unit	Baik
14	Laptop	10 unit	Baik

15	Printer	20 unit	Baik
16	Scanner	3 unit	Baik
17	Kendaraan roda 4	6 unit	Baik
18	Kendaraan roda 2	12 unit	Baik
19	AC Split	15 unit	Baik
20	Televisi	1 Unit	Baik
21	Jam Dinding	5 Unit	Baik
22	Sound System	2 Unit	Baik
23	Megaphone	1 Unit	Baik
24	Dispenser	10 Unit	Baik
25	Kamera DSLR	1 Unit	Baik
26	Hardisk External	1 Unit	Baik
27	Handy Talky	3 Unit	Baik
28	Papan Tulis	1 Unit	Baik
29	Kotak Bendera	1 Unit	Baik
30	Kipas Angin	2 Unit	Baik
31	LCD Projector Infocus	1 Unit	Baik
32	Genset	1 Unit	Baik
33	Papan Nama	1 Unit	Baik
34	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	Baik
35	Mesin Penyedot Debu	1 Unit	Baik
36	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
37	Gedung Aula	1 Unit	Baik
38	Gedung Parkir	1 Unit	Baik

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu tidak adanya ruang pendukung seperti ruang perpustakaan dan arsip, gudang serta ruang aula masih terbilang sempit. Hal ini masih cukup jauh dari ruang kantor yang representatif.

Adapun dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rincian Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 6.245.720,687
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.233.825.331
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 1.548.697.351
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 290.120.000
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 245.456.776
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 757.910.645
	JUMLAH	Rp. 10.321.730.790

Sesuai Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1523/Perenc.Makro/2023 tanggal 06 Juni 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2023 sehingga anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 6.580.257.799,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.1.313.822.756,00

3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp.45.235.758.769,00
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 290.120.000,00
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 304.777.594,00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 4.265.910.445,00
	JUMLAH	Rp.57.990.647.363,00



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Tabel 1.8 Matriks Tindak Lanjut SAKIP 2022

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	Agar membuat penjelasan yang memadai tentang indikator kinerja antara lain: Makna Indikator, Alasan Pemilihan, Cara Penghitungan sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih spesifik dan hubungan kinerja antar jabatan maupun antar bidang dapat tergambar lebih jelas	Melakukan analisa tentang indikator yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III	1	Juli	Bagian Perencanaan dan keuangan	Dokumen yang menjelaskan Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Rumus telah tersusun
				Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Rumus			
		Agar dibuat rencana aksi untuk mencapai target kinerja	Membuat tabel rincian rencana aksi target kinerja 2023	1	Juli	Bagian Perencanaan dan keuangan	Rencana Aksi telah tersusun
				Tabel Rencana Aksi			
2	Pengukuran Kinerja	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang sehingga dapat diketahui hasil pencapaian kinerja secara berkala dan dapat dilakukan perbaikan/penyesuaian strategi, aktifitas, maupun anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Melakukan rapat-rapat untuk menentukan target kinerja dan pencapaian kinerja yang telah dilakukan	3 kali	Triwulan dan semester	Bagian Perencanaan dan keuangan	Terlaksananya monev TW I pada 7 Juni 2023 dan TW II pada 18 Juli 2023
		Agar mendokumentasikan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi berkala tersebut sehingga seluruh perubahan dalam aktifitas, kebijakan, strategi maupun anggaran dapat didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dari kinerja yang sudah dilakukan					Monev terdokumentasi
				Rapat-rapat			
3	Pelaporan Kinerja	Agar pelaporan kinerja direviu secara berjenjang sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas dan menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai	Pelaporan kinerja berupa realisasi anggaran telah dihimpun dalam LPSE	Web LPSE	Bulanan	Seluruh Bidang	Pelaporan Kinerja telah diketahui pimpinan dan seluruh pegawai

4	Evaluasi internal	Agar dilakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja sehingga diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut. Selanjutnya dibuat rencana aksi untuk mengatasi kendala, melakukan perbaikan sehingga target kinerja bisa dicapai	Menyusun rencana aksi	1 Kegiatan	Agustus	Bagian Perencanaan dan keuangan	Tersusunnya Rencana Aksi
---	--------------------------	--	-----------------------	------------	---------	---------------------------------	--------------------------



H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyajian Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor. 50 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD serta PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini disusun dengan sistematik penulisan sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Cascading Kinerja

E. Prosesn Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

I. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

B. Misi RPJMD

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

2. Eselon II (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan Tahun 2023

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. Indikator kinerja Utama (IKU)

2. Pernyataan Hasil Reviu

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

4. Cascading/Pohon Kinerja

5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)

6. Monev Renstra

7. Matriks Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya lebih operasional dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi cara lebih cepat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut membuat Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023.

A. Visi RP JMD

Dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 memiliki Motto : ***KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS***. Dengan Visi pembangunan adalah : Terwujudnya Tanah Laut yang **"BERINTERAKSI"** , Berkarya, Inovasi, Tertata, religius , Actual dan Sinergi., maka untuk pencapaian ditetapkan Misi daerah sebagai berikut :

B. Misi RPJMD

Misi 3

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Dengan Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Misi 4

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat

Dengan Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mendukung Misi 3 dan Misi 4, karena merupakan pencerminan apa yang ingin dicapai dalam mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut “.

Untuk mewujudkannya sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan budaya politik yang positif dan santun bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
2. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap Ideologi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai persatuan bangsa;
3. Mewujudkan tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini sebagai daya tangkal dan daya cegah untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
4. Mewujudkan kualitas dukungan operasional organisasi;

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kehidupan politik yang Demokratis, Dinamis dan Kondusif;
2. Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai persatuan bangsa;
3. Tercapainya tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini bagi generasi penerus bangsa
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kesbangpol serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kesbangpol menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
3. Meningkatnya Organisasi/ Lembaga politik yang aktif berpolitik
4. Meningkatnya penanganan pengaduan konflik
5. Meningkatnya forum kewaspadaan dini
6. Melaksanakan sosialisasi dan pemantapan bela negara serta forum pembauran kebangsaan
7. Melaksanakan sosialisasi/pengembangan desa etnis/suku dan forum pembauran
8. Meningkatkan kerukunan/keharmonisan antar unit beragama
9. Meningkatkan ketahanan, seni, agama , kemasyarakatan dan ekonomi.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
12. Meningkatnya pemenuhan dan pemeliharaan sapras kantor.

Sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategi organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018 – 2023 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100%	100%

No	Kinerja Utama Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jml gangguan/Konflik sosial yang di tangani}}{\text{Jumlah gangguan Konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Semua Bidang

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

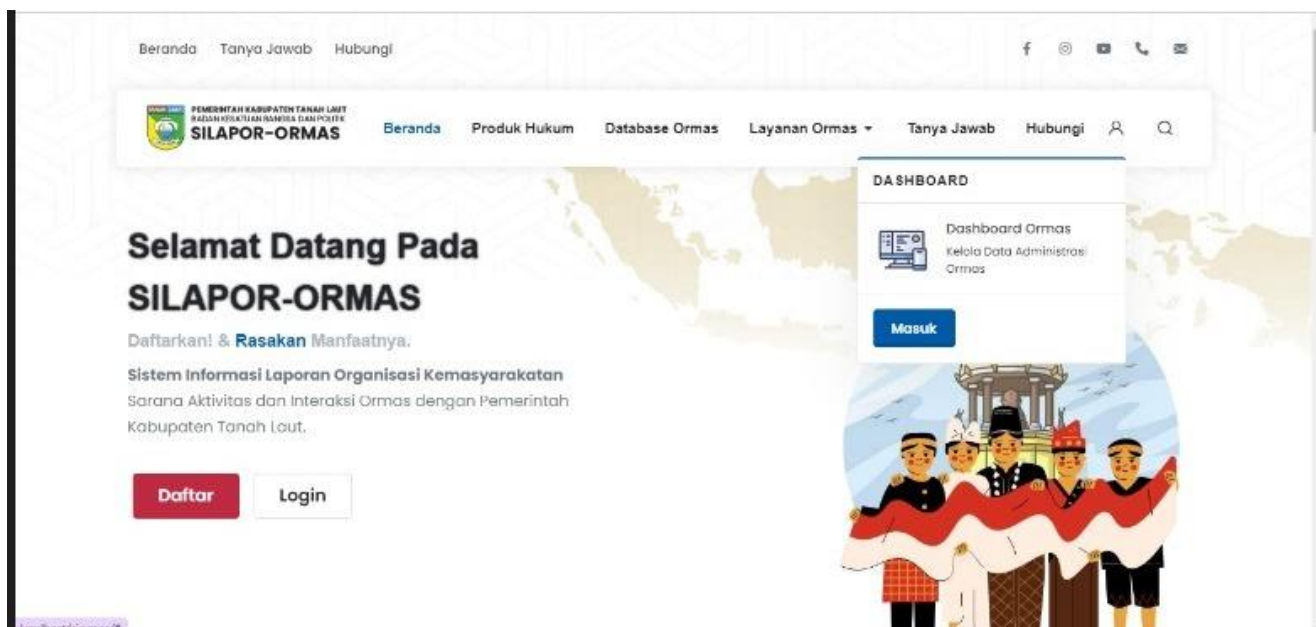
No	Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100 %
2	Sekretaris	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%
			Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	B
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	7 Dokumen
			Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Dokumen
		Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	28 Orang
4	Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	4 Laporan
		Menyiapkan data kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Dokumentasi Data dan Layanan surat menyurat	12 Dokumen
		Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	1 Orang

5	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%
6	Kepala Bidang Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	100%
7	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%
8	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	100%

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 melayani pemberian Rekomendasi Penelitian dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Masyarakat yang dikoordinir oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dalam pemberian Rekomendasi Penelitian dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan didukung oleh aplikasi berbasis web.

Gambar 2.1 Aplikasi SILAPOR-Ormas



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, oleh karena itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Capaian indikator kinerja utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menghitung capaian indikator kinerja utama dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditentukan.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama

	Kinerja Utama Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	2	3	4	5
	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Jml gangguan/Konflik sosial yang di tangani ----- x 100% Jumlah gangguan Konflik sosial yang terjadi	Semua Bidang

Target indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Presentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

serta meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat yang selalu menjaga nilai – nilai kebersamaan dalam menghadapi permasalahan.

Indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon II. Pada tahun 2023 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah semua Bidang, dan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan realisasi 100% Kinerjanya dan capaian realisasi keuangannya sebesar 97,85%,

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

<i>No.</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%

Jml gangguan/Konflik sosial yang di tangani

$$\begin{aligned}
 & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah } \textit{gangguan Konflik sosial} \text{ yang terjadi} \\
 & = \frac{5 \text{ Kasus}}{5 \text{ Kasus}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

a. Uraian Capaian IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tabel 3.7 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU). Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

Indikator kinerja utama yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik adalah potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani Perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial, yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Tabel : 3.3
Daftar Konflik Tahun 2023

No	Konflik	Tempat Kejadian Konflik
1	Sengketa Taman Permana yang belum memiliki izin tetapi beroperasi dan menerima kunjungan wisatawan	Desa Telaga
2	Sengketa Cetak Lahan Sawah yang belum memiliki kejelasan batas-batas antara kedua Desa	Desa Tambak Karya dan Desa Padang Luas
3	Ijin Pendirian Rumah Ibadat HKI mendapat penolakan dari masyarakat	Kelurahan Angsau
4	Kesalahpahaman Ijin Pendirian Rumah Ibadat Umat Katolik	Kecamatan Bati-Bati
5	Umat Salabi melarang masyarakat menggunakan langgar untuk Maulid dan Isra Mi'raj	Kelurahan Pabahanan

Tabel 3.4 Perbandingan dari Tahun ke Tahun

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2020	0	Tidak ada kejadian (Kasus)
2	2021	0	Tidak ada kejadian (Kasus)
3	2022	2	Terdapat 2 kejadian (Kasus)
4	2023	5	Terdapat 5 kejadian (Kasus)

Konflik yang terjadi selama tahun 2023 yaitu Konflik intern antarumat beragama dan konflik sosial. Jumlah konflik intern dan antarumat beragama Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 tidak ada konflik intern umat beragama, tetapi pada tahun 2023 terjadi 3 konflik inter umat beragama dan berhasil dimediasi. Capaian kinerja Jumlah konflik intern dan antar umat beragama adalah sebesar 100%.

Kerukunan umat beragama menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten merupakan tugas dan kewajiban Bupati selaku kepala daerah dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mempertahankan agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama selama tahun 2023. Banyak upaya yang dilakukan selama Tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
2. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi

3. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Peluncuran aplikasi SiLAPOR-Ormas yang berfungsi sebagai sarana dan interaksi Ormas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan :
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragaman dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan manunggal tuntung pandang (kegiatan bermalam di desa oleh Bupati, wakil bupati beserta ASN) yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Konflik Inter dan Antar Umat Beragama yang dilakukan mediasi/fasilitasi.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut sebagai mitra dan mempunyai peran signifikan yakni bersama - sama bersinergi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama sehingga diperlukan sikap keterbukaan dari berbagai pihak dan kemampuan untuk memahami dan mencermati serta menganalisa sumber-sumber konflik ataupun potensi-potensi yang bisa mengarah tersulutnya konflik.



Gambar 3.1

Pj. Bupati Tanah Laut bersama Pengurus FKUB dan Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu daerah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, hampir semua Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dihuni beraneka suku, ras dan agama tersebut menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten yang multikultural dan multiagama. Dengan beranekaragam ragam suku, ras dan agama akan sangat mudah terjadinya konflik apabila keragaman tidak dijaga dan dipelihara, oleh karena itu kehidupan harmonis dan rukun harus senantiasa dikokohkan di dalamnya, agar konflik tidak terjadi. Namun dalam perkembangan masih ada terjadi gesekan di kalangan antar suku, antar golongan dan antar agama. Pada Tahun 2023 ada konflik inter dan antar umat beragama, yaitu :

1. Ijin Pendirian Rumah Ibadat HKI di Kel. Angsau ada penolakan dari masyarakat dan masih belum bisa diberikan karena pihak dari gereja masih belum bisa memenuhi persyaratan yang diperlukan.



Gambar 3.2 Pendirian Rumah Ibadat HKI

2. Ijin Pendirian Rumah Ibadat Umat Katolik di Kecamatan Bati – Bati, sempat ada kesalahpahaman antara pihak gereja dan masyarakat sekitar, namun setelah dilakukan mediasi oleh FKUB dan Kecamatan Bati – Bati, sehingga

disepakati untuk disetujui pembangunan Rumah Ibadat namun tanpa mencantumkan simbol, nama gereja dan bentuk gereja sesuai adat istiadat sekitar.



Gambar 3.3 Mediasi Pendirian Rumah Ibadat Umat Katolik di Kecamatan Bati – Bati



Gambar 3.4 Mediasi Pendirian Rumah Ibadat Umat Katolik di Kecamatan Bati – Bati

3. Umat Salabi yang beralamat di Kel. Pabahanan RT 10 RW 4, melarang masyarakat menggunakan Langgar di Kel. Pabahanan RT 10 RW 4 untuk perayaan Maulid dan Isra Miraj, dilakukan mediasi sehingga kemudian Langgar bisa digunakan.



Gambar 3.5 Mediasi antara Warga dan Umat Salabi Kel. Pabahanan

Rekomendasi

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Melakukan dialog ke tokoh – tokoh lintas agama menyatukan persepsi dan pikiran untuk sama – sama menciptakan nuansa harmoni.

Ada tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian agar kerukunan tersebut dapat terwujud dalam masyarakat yang multikultural dan plural seperti Indonesia. Pertama, adanya para pengambil kebijakan publik yang adil dan mampu

mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik tersebut terhadap kerukunan beragama. Kedua, adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas. Ketiga, adanya masyarakat yang berpendidikan dan bersikap rasional dalam menyikapi keragaman keagamaan dan perubahan sosial

Konflik Sosial pada Tahun 2023

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Realisasi indikator jumlah konflik sosial tahun 2023 adalah **2 konflik** dan berhasil dimediasi 2 konflik tersebut.

Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
2. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelejen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.
5. Membentuk Perda tentang Fasilitasi Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.
6. Pembentukan Satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan agar tidak terjadi konflik sosial selama tahun 2023. Namun ada 2 permasalahan yang berpotensi menjadi konflik/sengketa dan secepat mungkin telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan laporan, terjadi ada 2 (Dua) permasalahan di Tahun 2023 yaitu; sengketa Pengelolaan Taman Permana dan Sengketa Cetak lahan sawah, Kedua permasalahan tersebut telah dimediasi, dengan kronologi sebagai berikut :

a. TAMAN PERMANA DIDESAS TELAGA

Manajemen/Pengelola Taman Permana di Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pertemuan dengan warga sekitar yang juga berdekatan dengan Taman Permana.

Pertemuan bertempat di aula kantor Kecamatan Pelaihari. Dan hadir pula beberapa SKPD terkait. Adapun Agenda pertemuan membahas pelaksanaan operasional Taman Permana yang dianggap mengganggu warga sekitar karena suara musik dari pengunjung yang melakukan perkemahan di lokasi tersebut.

Pada pertemuan tersebut terungkap bahwa operasional Taman Permana belum mempunyai izin usahanya, memperbolehkan pengunjung melakukan perkemahan, dan dari pihak pengelola Taman Permana belum mengizinkan pihak warga sekitar berjualan di area Taman Permana selama operasional dan belum adanya pengurangan harga masuk untuk anak-anak yang masuk yang melakukan outbond.

Operasional Taman Permana untuk sementara dihentikan sambil menunggu pihak pengelola melengkapi perizinan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat apabila semua sudah terpenuhi diperbolehkan lagi untuk operasional.



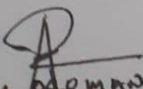
BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Harmoni Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dihadiri oleh sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir, telah dilaksanakan rapat koordinasi Forkopimcam Pelaihari dengan agenda : tindak lanjut Surat Ketua RT. 05/II Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Nomor : 04/116/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi aduan mengenai aktifitas Taman Permana yang terletak di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari,

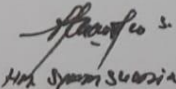
Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

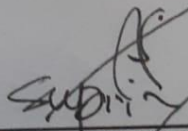
1. Sepakat membangun komunikasi yang baik antara Pengelola Taman Permana dengan Pemerintah Desa dan warga sekitar Taman Permana,
2. Pengelola Taman Permana bersedia menutup sementara Taman Permana sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan adanya kesepakatan membuka kembali berdasarkan hasil musyawarah antara pihak pengelola Taman Permana dengan Pemerintah Desa dan Warga sekitar Taman Permana,
3. Taman Permana dapat menerima rombongan dari Batola yang sudah dijadwalkan pada tanggal 18 Maret 2023, dan tidak menerima dari pihak lain.

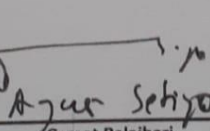
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

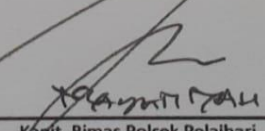

Edy PERMANA .
Pengelola Taman Permana


Kades Telaga


Ketua RT. 5


Danramil Pelaihari


Camat Pelaihari


Kanit. Bimas Polsek Pelaihari

KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI FORKOPIMCAM			
HARI/TANGGAL: Senin, 6 Maret 2023			
No.	NAMA	DINAS / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Supriyanto	Danmud D2 Pelai	1
2	SM Sumarti	warga RT 5 RW 02	2
3	Kusnandar	Bekas Telaga	3
4	Aya Shofia Inayati	Pengelola Taman Permana	4
5	EDY PERMANA	"	5
6	Rendi Adriyani	"	6
7	HAT SPM SUDIN	KERIA RTCS DOROTELER	7
8	HASIM	"	8
9	WARTON P.	RT 05	9
10	Faridat	RT 05	10
11	Suwito	RT 5	11
12	IDA P.	RT 5	12
13	GINAWATI	R 5	13
14	YUANA	RT 5	14
15	MAWATI	RT 05	15
16	MARSINI	RT 05	16
17	DIMAS NUR A	Pengelola Taman Permana	17
18	Lidia Erlinda	Pengelola Taman Permana	18
19	RATNO	POLSEK PLH	19
20	Hj. ISKAWATI	RTD SPM I Telaga	20
21	MURUL HUSATI	TK MAWAR II TELAGA	21
22	LINAWATI	TK MAWAR II TELAGA	22
23	Anadi Fajar Sadik	PLD P3MD	23

No.	NAMA	DINAS / INSTANSI	TANDA TANGAN
26	ROSTHOKER	RTD Telaga	26
27	Abdullah Asyad	RTD Telaga	27
28	Agri Y	RTD Telaga	28
29	Andi Rahman	KPD Dan Telaga	29
30	Abdullah	Kecamatan	30
31	Endang	DPMKIP	31
32	Wardana	Kecamatan	32
33	Muhammad NS	DPMKIP	33
34	Zaid Umar AS	Kecamatan Telaga	34
35	RAHMAN	Kecamatan	35
36	MUSRIAN FANIZ	"	36
37	Rasmayati	Sekolah	37
38	SUPRIYANTO P.	Sekolah	38
39	Irwan Effendy	Kecamatan Dusun 4 Telaga	39
40	ARISWATI R.	POLRES Telaga	40
41	M. FADAR	"	41
42	Supriyanti	Kecamatan	42
43	MARTI RIZ	Kecamatan	43
44	Kamuran	Kecamatan TL	44
45	Jamburausyah	warga Desa	45
46	Hani Herawan	Sekolah	46
47	Bimo D	POLRES GL	47
48	X Zoni	Pemerintah Desa	48
49	Ria S	Pemerintah Desa	49
50	Sri Linda Ashuti	Kecamatan Peranokan Desa	50
51	POT	Pemerintah	51

53	54
54	55
55	56
56	57
57	58
58	59
59	60
60	61
61	62
62	63
63	64
64	65
65	

CAMAT PELAIHARI,

AGUS SETIYO, SSTP, MM.
Pembina / IV/a
NIP. 19850808 200412 1 001

Gambar 3.6 Mediasi Sengketa Taman Permana Desa Telaga

b. SENGKETA CETAK LAHAN SAWAH

Sengketa cetak lahan sawah antar dua desa yaitu Desa Tambak Karya dan Desa Padang Luas.

Sengketa tersebut sudah dilakukan beberapa kali mediasi diwilayah kedua desa yang bertempat dikantor Camat Kurau, mediasi dihadiri beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui lebih detail terkait batas desa antar keduanya, karena proyek cetak sawah diprakarsai oleh desa Tambak Karya saat pelaksanaan kegiatan proyek luasan wilayah tidak mencukupi hal ini yang memungkinkan luasan area sampai di desa Padang Luas, inilah yang memicu pihak desa Padang Luas belum menerima batas-batas wilayah desa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan proyek cetak sawah.

Saat ini proyek cetak sawah terhenti menunggu kejelasan batas desa, hal ini mengakibatkan kerugian bagi warga yang mempunyai lahan diarea rencana cetak sawah dikarenakan kalau untuk membuka lahan persawahan baru memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga dengan proyek cetak

lahan sawah ini warga sangat diuntungkan dan tanpa mengeluarkan biaya dan bisa meningkatkan hasil panen di wilayah kec.Kurau dan Kab.Tanah Laut pada umumnya.

Kegiatan pembukaan lahan pertanian baru dihentikan, hingga disepakatinya batas lahan pertanian di kedua desa.



Gambar 3.7 Koordinasi Ke Balai Desa Tambak Karya terkait sengketa Cetak Lahan sawah

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut agar tidak lagi terjadi konflik sosial :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan :
- 4) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, dan aspirasi masyarakat
- 5) Melakukan sosialisasi peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik sosial.

6) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.

7) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik sosial diwilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk :

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera, Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
3. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
4. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
5. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Uraian Capaian Sasaran sesuai Misi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah menjalankan tahun anggaran 2023, yang mana telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsi itu sendiri. Ditinjau dari capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan misi maka kita dapat lihat penjelasannya pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Sesuai Misi
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggara an pemerintah Daerah dankehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	1. Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	1) Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	Sudah termediasi
			2. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional,Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	2) Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%	100%	100%	Sudah Termediasi
			3. Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3) Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	100%	>100%	>100%	Melebihi Target
44	Mewujudkan tatanan nilai nilai kewaspadaan dini sebagai daya tangkal dan daya cegah untuk masyarakat kabupaten Tanah Laut	Tercapainya tatanan nilai- nilai kewaspadaandini bagi generasi penerus bangsa	4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5) Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	30%	30%	Belum Mencapai Target
			5. Meningkatnya Pembinaan an Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2) Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	121%	121%	Melebihi Target
			6. Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7) Persentase Pencerahan peserta penyuluhan, sosialisasi, Bela Negara, penguatan karakter Kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan	100%	9,09%	9,09%	Tidak Mencapai Target

	Mewujudkan kualitas dukungan operasional organisasi	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.	7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	9) Jumlah Data Aset dan Urusan Sarana Prasarana administrasi Perkantoran	4 Laporan	4 Laporan	100%	Sudah Terpenuhi Target
				6) Jumlah Dokumentasi Data dan Layanan surat Menyurat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Sudah Terpenuhi Target
				11) Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan/ Bimtek	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terpenuhi
				12) Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	Sudah tercapai Target
				13) Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Sudah Mencapai Target
				14) Jumlah pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangannya	28 Orang	26 Orang	92,85%	Hampir tercapai Target
				15) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	B	B	B	Sudah Mencapai Target

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 10790629 200003 1 004

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4					5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	-	-	-	100%	100 %
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	-	-	100%	82,33%	100%
		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	-	100%	100%	94,79%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB	B	B	BB	B
3	Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	92%	100%	100%	100%	100%
		Dokumen Pelaporan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%
	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	-	-	-	-	92,85%
4	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	100%	-	66,67%	-	100%
	Menyiapkan data kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Dokumentasi Data dan Layanan surat menyurat	98%	100%	100%	100%	100%
	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	-	-	-	20%	100%
5	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	-	92,30%	92,30%	-	9,09%

6	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	79%	-	-	-	>100%
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	-	-	-	100%	30%
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	80,01	121%
8	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	180%	-	-	-	100%

C. Upaya Perbaikan Untuk Kinerja Yang Akan Datang

Sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- Meningkatkan komitmen antar Bidang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai
- Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan
- Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan

menggunakan pengembangan teknologi (aplikasi/web).

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

a. Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai. Berikut tabel realisasi belanja tidak langsung tahun 2022 dan 2023 seperti di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	2.633.989.739,-	2.263.496.931,-	85,93	2.570.975.793,-
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.558.636.183,-	2.108.851.241,-	82,42	2.106.224.354,-
	Total	5.192.625.922	4.372.348.172,-	84,20	4,677,200,147,-

Belanja Pegawai tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami pengurangan sumber daya aparatur dengan pensiunnya beberapa pegawai dan tidak ada mutasi masuk pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional keperluan Kantor dan operasional di lapangan (keperluan masyarakat agar bisa mengerti dan memahami setiap permasalahan di masyarakat itu sendiri) Berikut tabel Rekapitulasi Belanja Barang dan jasa Tahun 2023

Tabel.3.8

Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Outout dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023	Realisasi		
					Fisik (%)	Keuangan	
						Rp	%
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.580.257.799,00	99,80%	5.601.651.250,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.494.625,00	100,00%	5.371.760,00	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	3.999.825,00	100,00%	3.085.210,00	77,13%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	4.494.800,00	100,00%	2.286.550,00	50,87%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.197.625.274,00	100,00%	4.375.279.830,00	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	5.192.625.922,00	100,00%	4.372.348.172,00	84,20%
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4.999.352,00	100,00%	2.931.658,00	58,64%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.759.000,00	100,00%	16.900.000,00	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	26 Paket	18.759.000,00	100,00%	16.900.000,00	90,09%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			419.535.348,00	98,77%	382.667.983,00	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	2.609.476,00	100,00%	2.309.500,00	88,50%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	128.585.498,00	100,00%	102.622.537,00	79,81%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	5.211.704,00	100,00%	3.919.240,00	75,20%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	14.572.830,00	100,00%	14.546.940,00	99,82%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Paket/ Bahan Material yang disediakan	1 Paket	9.980.840,00	100,00%	9.763.400,00	97,82%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	257.375.000,00	98,00%	248.306.366,00	96,48%

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			358.624.250,00	100,00%	322.065.250,00	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			16.385.544,00	100,00%	13.870.250,00	84,65%
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	3.294.758,00	100,00%	2.842.000,00	86,26%
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	2 Unit	338.943.948,00	100,00%	305.353.000,00	90,09%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.066.488,00	96,97%	189.613.011,00	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	91,00%	43.237.972,00	57,65%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	148.066.488,00	100,00%	146.375.039,00	98,86%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			354.152.814,00	99,62%	309.753.416,00	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	27.925.000,00	100,00%	23.993.150,00	85,92%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	104.395.500,00	100,00%	89.905.766,00	86,12%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unti	15.000.000,00	91,00%	12.265.000,00	81,77%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	206.832.314,00	100,00%	183.589.500,00	88,76%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.313.822.756,00	99,42%	1.177.829.234,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.313.822.756,00	99,42%	1.177.829.234,00	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 Orang	76.629.520,00	90,00%	61.670.000,00	80,48%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	583 Orang	1.237.193.236,00	100,00%	1.116.159.234,00	90,22%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA			45.235.758.769,00	99,99%	45.224.560.350,00	

	SERTA BUDAYA POLITIK						
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			45.235.758.769,00	99,99%	45.224.560.350,00	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1280 Orang	45.167.760.311,00	100,00%	45.166.121.550,00	100,00%
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	440 Orang	49.999.158,00	100,00%	48.450.050,00	96,90%
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	17.999.300,00	66,00%	9.988.750,00	55,50%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			290.120.000,00	100,00%	288.485.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			290.120.000,00	100,00%	288.485.000,00	

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	228 Orang	290.120.000,00	100,00%	288.485.000,00	99,44%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			304.777.594,00	100,00%	275.946.440,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			304.777.594,00	100,00%	275.946.440,00	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1925 Orang	304.777.594,00	100,00%	275.946.440,00	90,54%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			4.265.910.445,00	99,90%	4.174.778.959,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			4.265.910.445,00	99,90%	4.174.778.959,00	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1 Hibah SPN Polda Kalsel	3.500.000.000,00	100,00%	3.500.000.000,00	100,00%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	276.615.445,00	100,00%	260.827.480,00	94,29%

8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	22.295.000,00	80,00%	15.748.750,00	70,64%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	467.000.000,00	100,00%	398.202.729,00	85,27%
				57.990.647.363	99,95%	56.743.251.233	97,85%

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 10790629 200003 1 004

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Dari tabel 3.32 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 56.743.251.233,- dari total anggaran sebesar Rp 57.990.647.363,- atau sebesar 97,85 % realisasi keuangan dan 99,95 % realisasi fisik terdiri dari :

Tabel 3.9

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.313.822.756	1.177.829.234	89,65%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4.265.910.445	4.174.778.959	97,86%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.580.257.799	5.601.651.250	85,13%
2	Mewujudkan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	45.235.758.769	45.224.560.350	99,98%

	masyarakat				
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	290.120.000	288.485.000	99,44%
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	304.777.594	275.946.440	90,54%

Ringkasan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Ringkasan APBD Tahun 2022 terhadap Tahun 2023

No.	2022		2023	
	Belanja Operasi	Jumlah	Belanja Operasi	Jumlah
1	Belanja Pegawai	4.673.690.147,00	Belanja Pegawai	4.372.348.172,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.302.135.622,00	Belanja Barang dan Jasa	3.090.757.311,00
3	Hibah (Bantuan keuangan)	4.609.698.550,00	Hibah (Bantuan keuangan)	48.860.760.550,00
4	Belanja Modal	67.028.000,00	Belanja Modal	419.385.200,00
	Total	10.653.552.319,00	Total	56.743.251.233,00

Realisasi fisik tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi fisik ada peningkatan di tahun 2023 sebesar 0,89% sedangkan realisasi keuangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,62%.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

No	2022		No	2023	
	Nama Program	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Penyediaan Bahan/ Material
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Pengadaan Mebel
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
					Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

			3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
			4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah
			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah
			6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel.3.12
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

	2021	2022	2023
Program	8	6	6
Kegiatan	11	9	12
Sub Kegiatan	27	19	32

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Belanja
SKPD Tahun 2022 dan 2023

Versi LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)	% Kenaikan/ Kekurangan
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASIONAL	10,652,552,319,00	56.323.866.033,00	428,73%
	Belanja pegawai	4.673.690.147,00	4.372.348.172,00	-6,45%
	Belanja barang dan Jasa	1,302,135,622,00	3.090.757.311,00	137,36%
	Belanja Hibah	4,609,698,550,00	48.860.760.550,00	960%
2	BELANJA MODAL	67,028,000,00	419.385.200,00	525,69%
	Belanja Modal	67,028,000,00	419.385.200,00	525,69%
	SURPLUS/(DEFISIT)	10,652,552,319,00	56.743.251.233,00	432,67%

Realisasi pendapatan asli daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebesar Rp.10,652,552,319,00 dan Tahun 2023 Rp.56.743.251.233,00 ada peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sehingga semua kegiatan di laksanakan sesuai dengan ketentuan dan hibah bantuan keuangan untuk 10 Partai Politik, Pilkada 2024 dan Hibah Ormas mencapai 100%.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pembuatan laporan kinerja antara lain

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 Sasaran Strategis dan 32 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2023, rata-rata telah tercapai seluruhnya dan terdapat 28 indikator sasaran yang realisasinya memenuhi target, namun pada tahun 2023 ada 4 indikator yang realisasinya tidak memenuhi dari target. Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah mencapai capaian realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,85%. Dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 94,79% ada sedikit kenaikan sebesar 3,62%.

Maka dapat dijelaskan bahwa untuk hasil sasaran yang tercapai ada pada sasaran yang belum mencapai 100% kegiatanpun semua sudah optimal pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kekurangan Tenaga yang Handal dan Kreatif sehingga beberapa kegiatan berjalan tidak sesuai yang diharapkan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi untuk mendukung peningkatan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

- a. Melaksanakan program kegiatan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dengan materi 4 (empat) pilar;

- b. Melaksanakan Pendidikan Politik bagi masyarakat dan Pengurus Partai Politik;
- c. Melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi Organisasi Masyarakat;
- d. Melaksanakan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- e. Memfasilitasi Deteksi Dini dan tes urine kepada Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- f. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini konflik pada lapisan masyarakat;
- g. Memperkuat dan mengoptimalkan kinerja Forum-forum yang telah dibentuk (FKDM, FKUB dan FPK).

Demikian laporan kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut disampaikan. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 10790629 200003 1 004





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

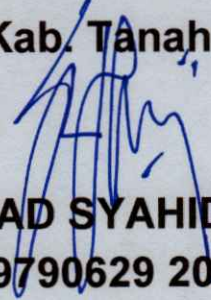
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Jabatan : Kepala Badan

Tugas : Melaksanakan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang terjadi}} \times 100$	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Tanah Laut


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Jabatan : Sekretaris

Tugas : Merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan Kepegawaian	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
		Persentase perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Persentase perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Kepala Badan Kesbangpol

Kab. Tanah Laut

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP.19790629 200003 1 004

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kab. Tanah Laut

Drs. H. YUSRIANSYAH

NIP.19660415 199401 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Jabatan : Kabid Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan
Tugas : Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan

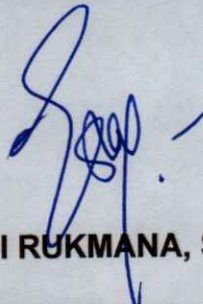
No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	<u>Makna Indikator:</u> Semakin kuat pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, semakin baik kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
			<u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, semakin baik kehidupan bertoleransi masyarakat untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Tanah Laut <u>Cara Penghitungan</u> $\frac{\text{Jumlah Penyuluhan pada 2023} - \text{2022}}{\text{Jumlah Penyuluhan di 2022}} \times 100\%$ Bentuk Peningkatan: jumlah penyuluhan/sosialisasi	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

Kepala Bidang Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan



EDI RUKMANA, SE
NIP. 19741216 199403 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Jabatan : Kepala Bidang Politik
Tugas : Mengkoordinasikan, pembinaan hubungan dengan partai politik, pembinaan politik masyarakat dan fasilitasi pemilihan umum

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	<u>Makna Indikator:</u> Semakin banyak masyarakat yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik, serta kader yang mengikuti rapat dan sosialisasi bantuan keuangan maka semakin tinggi pendidikan politik yang diterima masyarakat. <u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan tingginya pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, semakin banyak pengetahuan tentang politik di masyarakat. <u>Cara Penghitungan</u> $\frac{\text{Jumlah Peserta yang hadir tahun 2023} - 2022}{\text{Jumlah Peserta yang hadir di 2022}} \times 100$ Bentuk peningkatan: jumlah peserta lebih banyak sehingga pengetahuan politik masyarakat lebih tinggi	Badan Kesbangpol Kat Tanah Laut

Kepala Badan Kesbangpol

Kab. Tanah Laut

MOHAMMAD SYAHID S.STP, M.AP

NIP.19790629 200003 1 004

Kepala Bidang Politik

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN

NIP. 19721106 199101 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Jabatan : Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Tugas : Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi

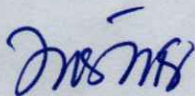
No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	<u>Makna Indikator:</u> Semakin banyak jumlah ormas yang mendaftarkan dan melaporkan keberadaan organisasinya, maka semakin mudah dalam pengawasan dan pembinaan dan semakin tinggi ormas yang mendapatkan dana hibah sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat <u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan tingginya ormas yang mendaftarkan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat, maka semakin terbantu juga program kinerja pemerintah <u>Cara Penghitungan</u> $\frac{\text{Jumlah Ormas berSPTL}(n) - \text{Jumlah Ormas berSPTL}(-1)}{\text{Jumlah Ormas berSPTL}(-1)} \times 100$ Bentuk peningkatan: Jumlah ormas berSPTL	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	<u>Makna Indikator:</u> Semakin tinggi jumlah peserta yang mengikuti tes urine, maka semakin tinggi tingkat Ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba <u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan tingginya jumlah peserta yang mengikuti tes urine, maka semakin tinggi tingkat Ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba sehingga terjaga ketertiban di masyarakat <u>Cara Penghitungan</u> $\frac{\text{Jumlah Peserta tes urine yang hadir 2023} - 2022}{\text{Jumlah Peserta tes urine yang hadir di 2022}} \times 100\%$ Bentuk Peningkatan: Jumlah Peserta yang mengikuti tes urine	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi,
Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan



YUSTINA, SKM, M.Ling
NIP. 19790522 199803 2 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

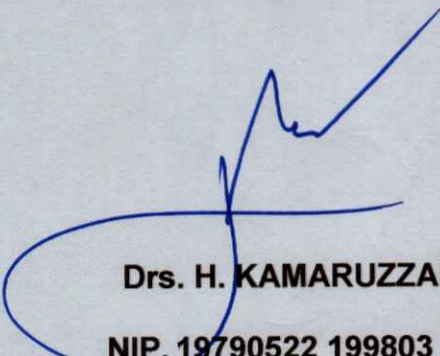
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Jabatan : Kabid Kewaspadaan Nasional
Tugas : Mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Nasional

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	<u>Makna Indikator:</u> Semakin tinggi tingkat fasilitasi konflik yang tertangani, maka semakin cepat melaksanakan cegah dini terhadap potensi berbagai ancaman ketertiban di Kabupaten Tanah Laut	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
			<u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan fasilitasi penanganan konflik social anak meminimalisir berbagai ancaman ketertiban di masyarakat <u>Cara Penghitungan</u> $\frac{\text{Jumlah fasilitasi konflik sosial}}{\text{Jumlah konflik sosial yang dilaporkan}} \times 100\%$ Bentuk peningkatan: Jumlah konflik social tertangani	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Tanah Laut


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

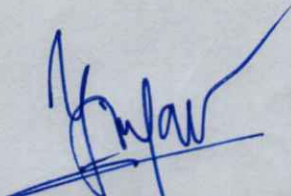

Drs. H. KAMARUZZAMAN
NIP. 19790522 199803 2 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Tugas : Penyusunan program kegiatan, mengkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan penata usahaan keuangan

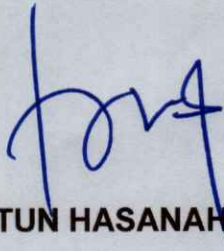
No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Cara Menghitung Indikator Kinerja	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	7 Dokumen	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
2	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Dokumen Pelaporan yang disusun	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Dokumen	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
		Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangannya	Jumlah pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangannya	28 Orang	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Sekretaris Badan Kesbangpol
Kab. Tanah Laut



Drs. H. YUSRIANSYAH
NIP. 19660415 199401 1 001

Plt. Kasubbag Perencanaan & Keuangan



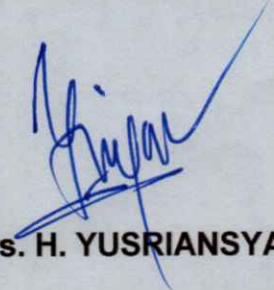
IKHWATUN HASANAH, SE
NIP. 19930107 202203 2 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tugas : Menyusun Program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Merencanakan, mengadakan, mengelola sarana dan prasarana

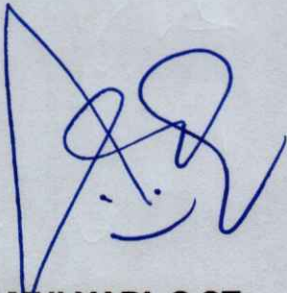
No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Cara Menghitung Indikator Kinerja	Target	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Jumlah Data Aset dan Urusan Sarana Prasarana administrasi Perkantoran	4 Laporan	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
2	Menyiapkan data kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Dokumentasi Data dan Layanan surat menyurat	Jumlah Dokumentasi Data dan Layanan surat menyurat	12 Dokumen	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut
3	Menginventarisir Peningkatan Kapasitas SDM	ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	1 Orang	Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

Sekretaris Badan Kesbangpol
Kab. Tanah Laut


Drs. H. YUSRIANSYAH

NIP. 19660415 199401 1 001

Kasubbag Umum & Kepegawaian


MULYADI, S.ST

NIP. 19660420 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.8/138/LHE-AKIP/Insp2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tanah Laut
di-

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 800.1.11.1/231/Insp/2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implelementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Renstra SKPD
 - b. Renja SKPD
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - e. Perjanjian Kinerja (PK)
 - f. Cascading/Pohon Kinerja
 - g. Laporan Kinerja
 - h. Dokumen lain yang mendukung.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar **70,25** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:
- a. *Perencanaan Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 19,8 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **B (Baik)**.
 - b. *Pengukuran Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 21,3 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
 - c. *Pelaporan Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 10,65 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
 - d. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal*
Diperoleh nilai sebesar 18,5 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, dapat diperoleh nilai sebesar 37,5%.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja:

- 1) Agar membuat penjelasan yang memadai tentang indikator kinerja antara lain:
 - Makna Indikator

- Alasan Pemilihan
- Cara Penghitungan

sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih spesifik, dan hubungan kinerja antar jabatan maupun antar bidang dapat tergambar lebih jelas

- 2) Agar dilakukan evaluasi berkala atas dokumen Perencanaan Kinerja sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja, dan dibuat rencana aksi untuk mencapai target kinerja.

i. Pengukuran Kinerja:

- 1) Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang sehingga dapat diketahui hasil pencapaian kinerja secara berkala dan dapat dilakukan perbaikan/penyesuaian strategi, aktifitas, maupun anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 2) Agar mendokumentasikan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi berkala tersebut.

Sehingga seluruh perubahan dalam aktivitas, kebijakan, strategi maupun anggaran dapat didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dan kinerja yang sudah dilakukan.

ii. Pelaporan Kinerja:

- 1) Agar dalam pelaporan kinerja informasi dan analisa yang disajikan disesuaikan dengan setiap target kinerja yang telah dicapai.
- 2) Agar pelaporan kinerja direviu secara berjenjang sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas dan menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai.

iii. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

1. Agar dilakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja sehingga diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut.
2. Agar dibuat rencana aksi atas evaluasi kinerja internal yang telah dilakukan, hal ini dapat digunakan untuk mengatasi kendala, melakukan perbaikan sehingga target kinerja bisa dicapai.

Dan terhadap hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar segera dilakukan penyelesaian, yaitu pada komponen :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Inspektur,


Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PANRB di Jakarta
3. Arsip

LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIT KERJA: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE EVALUASI 2022

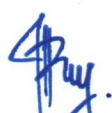
No	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	%-TASE
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		19,80	66,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40	90,00%
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	CC	5,40	60,00%
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	CC	9,00	60,00%
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				

No	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	%-TASE
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,30	71,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40	90,00%
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	CC	5,40	60,00%
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50	70,00%
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,65	71,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70	90,00%

No	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	%-TASE
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	CC	2,70	60,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25	70,00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18,50	74,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50	90,00%
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				

No	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	%-TASE
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25	70,00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	B	8,75	70,00%
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00		70,25	70,25%

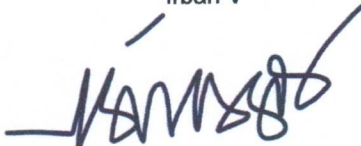
Pengendali Teknis


Hj. Rusmiati, MM
NIP. 19651028 198602 2 005

Evaluator


Muhammad Arif, A. Md
NIP. 19931208 201502 1 001

Mengetahui:
Irbani V


Mina Ayu Roswyda, ST
NIP. 19800805 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUKAMTA**

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 07 Januari 2023

Pihak Kedua

H. SUKAMTA

Pihak Pertama

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 6,245,720,687
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,233,825,331
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 1,548,697,351
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 290,120,000
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 245,456,776
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 4,257,910,645
	JUMLAH	Rp. 13,821,730,790

Pelaihari, 07 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDILLAH, M.Pd**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. SUKAMTA**

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 26 April 2023

Pihak Kedua

H. SUKAMTA

Pihak Pertama

ABDILLAH, M.Pd
NIP.19690910 199103 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4,704,014,307
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,168,526,031
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 64,351,301
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 220,120,000
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 111,704,336
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 4,201,195,705
	JUMLAH	Rp. 10,469,911,680

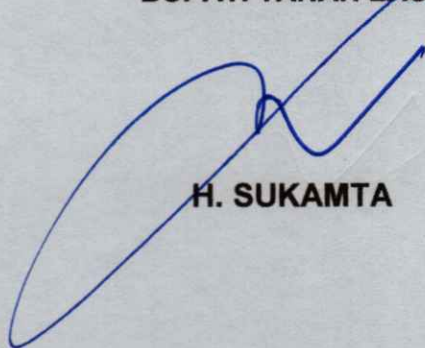
Pelaihari, 26 April 2023

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT**



ABDILLAH, M.Pd
NIP. 19690910 199103 1 011

BUPATI TANAH LAUT



H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. SUKAMTA**

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Juni 2023

Pihak Kedua

H. SUKAMTA

Pihak Pertama

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 3.996.611.697
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.151.513.531
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 56.256.301
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 144.070.000
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 99.183.456
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 660.823.045
	JUMLAH	Rp. 6.108.458.030

Pelaihari, 06 Juni 2023

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

**MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**

Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4.331.148.809
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.231.510.956
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 43.743.317.719
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 144.070.000
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 158.504.274
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 720.143.863
	JUMLAH	Rp. 50.184.625.621

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Yusriansyah**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

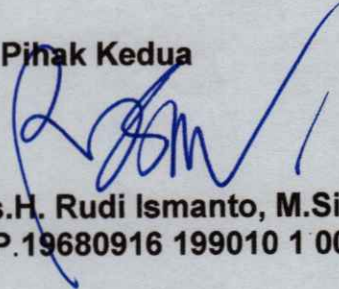
Selaku atasan pihak pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua


Drs.H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Pihak Pertama


Drs. H. Yusriansyah
NIP.19660415 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan Kepegawaian	100 %
		2. Persentase perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	B (69,00)

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.494.625
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.297.625.274
		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 18.759.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 180.743.354
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 158.820.618
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 251.992.488
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 329.285.328
		JUMLAH	Rp 6.245.720.687

Pelaihari, 06 Januari 2023

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Yusriansyah
NIP.19660415 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Yusriansyah**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mohammad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama

Drs. H. Yusriansyah
NIP.19660415 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan Kepegawaian	100 %
		2. Persentase perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	B (69,00)

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.494.625
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.197.625.274
		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 18.759.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 419.535.348
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 358.624.250
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 223.066.488
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 354.152.814
		JUMLAH	Rp 6.580.257.799

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Yusriansyah
NIP.19660415 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Haryantini, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Yusransyah**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

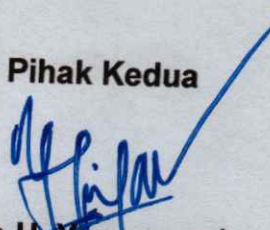
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

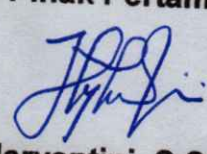
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua


Drs H. Yusransyah
NIP.19660415 199401 1 001

Pihak Pertama


Haryantini, S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018

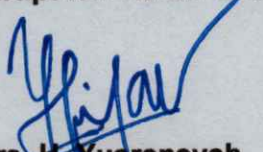
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu SKPD	7 Dokumen
2	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	1. Nilai komponen Perencanaan Kinerja	Nilai (22.00)
		2. Nilai Pelaporan Keuangan	Nilai (11.00)

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Urusan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.999.825
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.494.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.292.625.922
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 4.999.352
		JUMLAH	Rp. 6.245.720.687

Pelaihari, 06 Januari 2023

Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Yusransyah
NIP.19660415 199401 1 001

Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Haryantini, S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ikhwatun Hasanah, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Yusriansyah**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

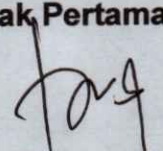
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua


Drs H. Yusriansyah
NIP.19660415 199401 1 001

Pihak Pertama


Ikhwatun Hasanah, SE
NIP.19930107 202203 2 005

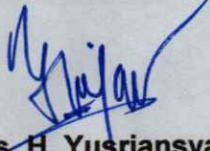
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu SKPD	7 Dokumen
2	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	1, Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Dokumen
		2. Jumlah pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangannya	28 Orang

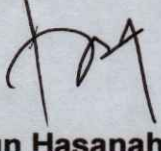
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Urusan Daerah	Penunjang Pemerintahan	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.314.615
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.734.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.848.925.648
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 3.105.694
		JUMLAH	Rp. 3.857.080.793

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Yusriansyah
NIP.19660415 199401 1 001

Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Ikhwatun Hasanah, SE
NIP.19930107 202203 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ikhwatun Hasanah, SE**

Jabatan : Penyusun Proram Anggaran dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Haryantini, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Haryantini, S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018

Pihak Pertama

Ikhwatun Hasanah, SE
NIP.19930107 202203 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen bahan data Program Anggaran dan Pelaporan yang diterima dan diperiksa	2 Dokumen
2	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah dokumen hasil pengklasifikasian bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan	2 Dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil kajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Program Anggaran dan Pelaporan	2 Dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan.	Jumlah dokumen konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	1 Dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan.	Jumlah kegiatan diskusi konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan dengan pejabat yang berwenang	20 Kegiatan
6	Menyusun kembali Program Anggaran dan Pelaporan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen Program Anggaran dan Pelaporan hasil perbaikan dari diskusi	7 Kegiatan
7	Mengevaluasi proses penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah laporan hasil evaluasi proses penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	2 Laporan
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	2 Laporan
9	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	2 Laporan

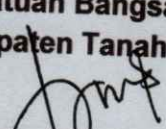
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD

Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Haryantini, S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018

Pelaihari, 06 Januari 2023

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Ikhwatun Hasanah, SE
NIP.19930107 202203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Ramlah, A.Md**

Jabatan : Bendahara

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Haryantini, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Haryantini, S.Sos

NIP.19650421 1986030 2 018

Pihak Pertama

Siti Ramlah, A.Md

NIP.19790204 200801 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen pengelolaan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan	20 Dokumen
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah surat permintaan pembayaran ke KPKN yang diajukan	15 Surat
3	Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah surat perintah membayar uang SPM Giro yang diurus	20 Surat
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah pembayaran atas tagihan yang dilaksanakan	700 Kegiatan
5	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah formulir daftar penerimaan dan pengeluaran uang yang disusun	700 Kegiatan
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan yang dibuat	20 Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	APBD

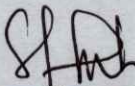
**Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanha Laut**



Haryantini, S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018

Pelaihari, 06 Januari 2023

**Bendahara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**



Siti Ramlah, A.Md
NIP.19790204 200801 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rina Hidayati**

Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Haryantini, S.Sos**

Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Haryantini, S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018

Pihak Pertama

Rina Hidayati
NIP.19821224 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang disortirJumlah dokumen yang diperiksa	120 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang diberi lembar pengantar	60 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi perencanaan dan program atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang dikelompokkan	60 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang didokumentasikan	60 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	100 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	500 Laporan

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daeah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD

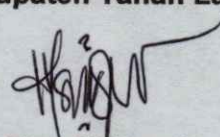
Pelaihari, 6 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Haryantini. S.Sos
NIP.19650421 198603 2 018

**Pengadministrasi Perencanaan
dan Pelaporan**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Rina Hidayati
NIP.19821224 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mulyadi, S.ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Yusransyah**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah Laut

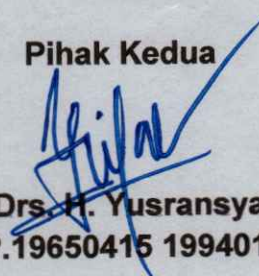
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua


Drs. H. Yusransyah
NIP.19650415 199401 1 001

Pihak Pertama


Mulyadi, S.ST
NIP.19660420 198903 1 013

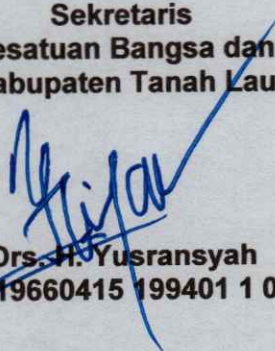
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Data Aset dan Urusan Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	4 Laporan
2	Menyiapkan data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi Data dan Layanan surat menyurat	12 Dokumen
3	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan/ Bimtek	1 Laporan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.620.245
		1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 35.003.433
		1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 34.972.808
		1.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.250.000
		1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 98.630.000
		2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 89.717.900
		2.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 34.753.468
		2.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 171.025.991
		3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp. 32.197.422
		3.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 129.092.265
		3.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp. 27.250.000
		JUMLAH	Rp. 656.513.532

Pelaihari, 06 Januari 2023

Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Yusransyah
NIP.19660415 199401 1 001

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Mulyadi, S.ST
NIP.19660420 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Zakiah, S.E**

Jabatan : Analis Tata Laksana

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyadi, S.ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

Mulyadi, S.ST

NIP.19660420 198903 1 013

Pihak Pertama

Siti Zakiah, S.E

NIP.19700701 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	6 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Tata Laksana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah dokumen hasil analisa	6 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Tata Laksana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Jumlah laporan hasil penelitian	1 Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	1 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	3 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	3 Laporan

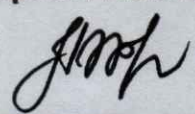
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Melaksanakan Urusan Umum	APBD
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang	APBD
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Mulyadi, S.ST
NIP.19660420 198903 1 013

Analisis Tata Laksana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Siti Zakiah, S.E
NIP.19700701 199203 2010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Laratna Handayani**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyadi, S.ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 18 Januari 2023

Pihak Kedua

Mulyadi, S.ST

NIP.19660420 198903 1 013

Pihak Pertama

Laratna Handayani

NIP.19730725 200712 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	70 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	75 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	66 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	70 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	60 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	50 Laporan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD

Pelaihari, 18 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Mulyadi, S.ST
NIP.19660421 198903 1 013

**Pengadministrasi Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Laratna Hadayani
NIP.19730725 200712 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Warsini**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyadi, S.ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Mulyadi, S.ST

NIP.19660420 198903 1 013

Pihak Pertama

Warsini

NIP.19670803 200801 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	2.500 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	1.400 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	400 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	300 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	500 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	20 Laporan

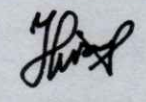
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
		2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Mulyadi, S.ST
NIP.19660421 198903 1 013

**Pengadministrasi Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Warsini
NIP.19670803 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sahdan**

Jabatan : Pengemudi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyadi, S.ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Pertama

Sahdan

NIP.19790405 200701 1 009

Pihak Kedua

Mulyadi, S.ST

NIP.19630323 198502 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik	Jumlah laporan pemeriksaan kerusakan kelengkapan kendaraan	60 Laporan
2	Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin	Jumlah kegiatan memanaskan mesin	60 Kali
3	Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih	Jumlah kegiatan perawatan kendaraan	48 Kali
4	Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat	jumlah kegiatan mengemudi kendaraan	60 Kali
5	Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi secara layak	Jumlah kegiatan perbaikan kerusakan kecil	36 Kali
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	60 Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	60 Laporan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Melayani, memelihara kendaraan roda 4 dan mengoprasionalkan secara kedinasan	Melayanani transportasi operasional secara kedinasan	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Mulyadi, S.ST
NIP.19660420 198903 1 013

**Pengemudi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


S a h a n
NIP.19790405 200701 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Supinal Anwar, S.Sos, M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Pihak Pertama

H. Supinal Anwar, S.Sos, M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	

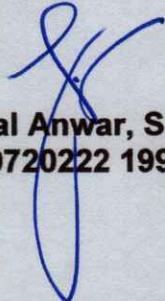
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;	
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Rp. 159.884.659
		2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Rp. 70.190.988
		J u m l a h	Rp. 230.075.647

Pelaihari, 02 Januari 2023

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

**Kepala Bidang Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


H. Supinal Anwar, S.Sos, M.AP
NIP.19720222 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Edi Rukmana, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

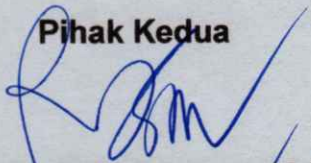
Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

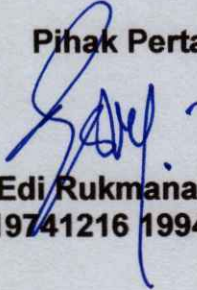
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 Februari 2023

Pihak Kedua


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Pihak Pertama


Edi Rukmana, SE
NIP.19741216 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%

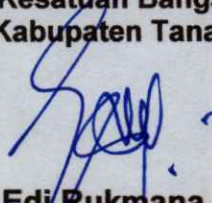
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;	
		1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 76.629.520
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Rp. 1157.195.811
		J u m l a h	Rp. 1.233.825.331

Pelaihari, 20 Februari 2023

**Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

**Kepala Bidang Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Edi Rukmana, SE
NIP.19741216 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Edi Rukmana, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mohammad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

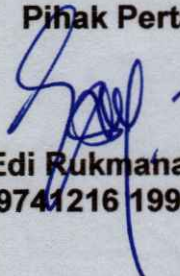
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua


Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama


Edi Rukmana, SE
NIP.19741216 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;	
		3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 76.629.520
		4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Rp. 1.237.193.236
		J u m l a h	Rp. 1.313.822.756

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

**Kepala Bidang Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**

Edi Rukmana, SE
NIP.19741216 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAMLAH, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pihak Pertama

Ramlah, S.Sos
NIP.19680719 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	BUTIR KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai SKPD	Jumlah penyusunan Rencana Kerja	90 Laporan
2	Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat daerah;	Mengumpulkan Issue2 Kebijakan	12 Laporan
3	Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan;	Pemetaan Masalah	18 Laporan
4	Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan;	Informasi yang berkembang	33 Laporan
5	Monitoring dan Evaluasi kebijakan;	Jumlah kegiatan	33 Laporan
6	Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh;	Jumlah Data dan Informasi	60 Laporan
7	Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan;	Jumlah data dan informasi	33 Laporan
8	Menganalisis permasalahan kebijakan;	Sengketa masalah	10 Laporan
9	Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);	Draft Telalaahan Staf	24 Draft
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegaitan	226 Laporan

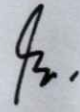
NO	SASARAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	APBD

**Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pelaihari, 02 Januari 2023

**Analisis Kebijakan Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Ramlah, S.Sos
NIP.19680719 200003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I r h a m, S.AP**

Jabatan : Analis Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

H.Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pihak Pertama

I r h a m, S.AP
NIP.19660810 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	12 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Analis Wawasan Kebangsaan dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah dokumen hasil analisa	16 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Analis Wawasan Kebangsaan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Jumlah laporan hasil penelitian	12 Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	1 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	12 Data
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	360 Laporan

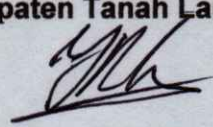
No	Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	APBD

Pelaihari, 02 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Analisis Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


I r h a m, S.AP
NIP.19660810 199002 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dhany Perdana Rakhmatullah**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

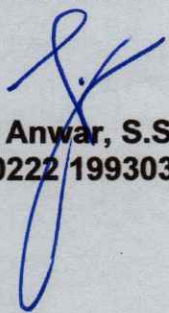
Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua


H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pihak Pertama


Dhany Perdana Rakhmatullah
NIP.19810326 201406 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang disortirJumlah dokumen yang diperiksa	Dokumen	300
2	Mengelompokkan administrasi Umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang dikelompokkan	Dokumen	24
3	Mendokumentasikan administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang didokumentasikan	Dokumen	24
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	Laporan	12
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	Laporan	300

	Pelaksanaan	Hasil Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Penyuluhan / sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	Jumlah kelulusan peserta penyuluhan / Sosialisasi, Bela Negara, Kerekta Bangsa dan Pembauran	APBD

Pelaihari, 02 Januari 2023

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pengadministrasi Umum
Pada Sub Bagian Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Dhany Perdana Rakhimatullah
NIP.19810326 201406 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Susiati**

Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

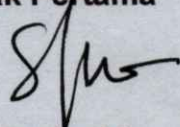
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua


H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pihak Pertama


Susiati
NIP.19800101 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Data Penyajian dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang disortir	70 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi Data Penyajian dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang diberi lembar pengantar	250 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi Data Penyajian dan Publikasi atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang dikelompokkan	150 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi Data Penyajian dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang didokumentasikan	120 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	120 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	120 Laporan

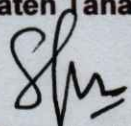
	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	APBD

Pelaihari, 02 Januari 2023

Kepala Bidang Bina Idiologi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


H. Supinal Anwar, S.Sos. M.AP
NIP.19720222 199303 1 005

Pengadministrasi Data Penyajian
dan Publikasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Susiati
NIP.19800101 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Muhammad Badaruddin**

Jabatan : Kepala Bidang Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

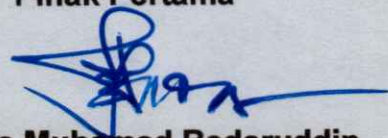
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1001

Pihak Pertama


Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	100%

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 1.529.697.397
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 13.999.306
		3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 4.999.648
		J U M L A H	Rp. 1.548.697.351

Pelaihari, 06 Januari 2023

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Muhammad Badaruddin**

Jabatan : Kepala Bidang Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Mohammad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	1. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3, Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Batuan Keuangan kepada Partai Politik	100 %
		2. Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100 %

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 45.235.758.769
		J U M L A H	Rp.45.235.758.769

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Kepala Bidang Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bahtiar, S.Pd**

Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Badaruddin**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19830424 200903 1 013

Pihak Pertama

Bahtiar, S.Pd
NIP.19651107 198804 1 003

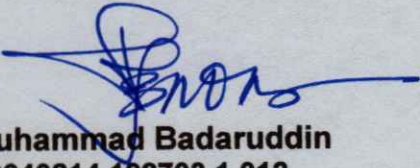
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	BUTIR KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai SKPD	Jumlah penyusunan Rencana Kerja	24 Laporan
2	Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat daerah;	Mengumpulkan Issue2 Kebijakan	60 Laporan
3	Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan;	Pemetaan Masalah	24 Laporan
4	Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan;	Informasi yang berkembang	60 Laporan
5	Monitoring dan Evaluasi kebijakan;	Jumlah kegiatan	60 Laporan
6	Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh;	Jumlah Data dan Informasi	60 Laporan
7	Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan;	Jumlah data dan informasi	60 Laporan
8	Menganalisis permasalahan kebijakan;	Sengketa masalah	60 Laporan
9	Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);	Draft Telalaahan Staf	60 Draft
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegaitan	240 Laporan

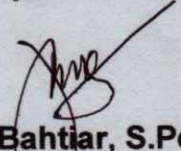
NO	SASARAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19640214 198703 1 012

Analisis Kebijakan Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Bahtiar, S.Pd
NIP.19651107 198804 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M.I. Herlambang, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Analis Partai Politik

Pada Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Badaruddin**

Jabatan : Kepala Bidang Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001

Pihak Pertama

M.I. Herlambang, S.Sos. M.Si
NIP.19730314 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	16 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Partai Politik dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil analisa	18 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Partai Politik dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian	14 Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	14 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	16 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	35 Laporan

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	1. Pelaksaaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	ABPD

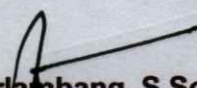
Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001

Analisis Partai Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



M.I. Herlanbang, S.Sos. M.Si
NIP.19730314 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Haji Ibrahlim, S,ST**

Jabatan : Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Badaruddin**

Jabatan : Kepala Bidang Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19650421 198603 2 018

Pihak Pertama

Haji Ibrahlim, S,ST
NIP.19690703 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	150 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah dokumen hasil analisa	145 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Jumlah laporan hasil penelitian	80 Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	60 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	25 Data
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	140 Laporan

No	Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. Muhammad Badarudin
NIP.19650421 198603 2 018

Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan
Masyarakat pada Sub Bidang Implementasi
Kebijakan Publik dan Pendidikan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Haji Ibrahimi, S.ST
NIP.19693007 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Susiati**

Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Bidang Politik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Badaruddin**

Jabatan : Kepala Bidang Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 September 2023

Pihak Kedua

Drs. Muhammad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001

Pihak Pertama

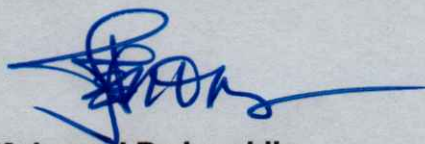
Susiati
NIP.19800101 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	32 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	32 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	8 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	10 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	32 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	32 Laporan

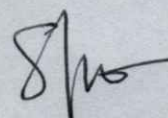
Pelaihari, 21 September 2023

Kepala Bidang Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. Muhamad Badaruddin
NIP.19721106 199101 1 001

Pengadministrasi Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Susiati
NIP.19800101 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yustina, SKM, M.Ling**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Pihak Pertama

Yustina SKM. M.Ling
NIP.19790522 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten 5 Ormas	100 %
2	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 1.880 Org	100%

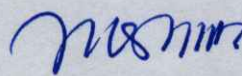
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 290.120.000
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Rp. 245.456.776
		J U M L A H	Rp.535.576.776

Pelaihari, 06 Januari 2023

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Rudi Ismanto, M. Si
NIP.19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Ketahanan Seni,Budaya
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Yustina SKM. M.Ling
NIP.19790522 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yustina, SKM, M.Ling**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mohammad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama

Yustina SKM. M.Likg
NIP.19790522 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100 %
2	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%

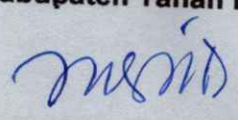
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 290.120.000
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Rp. 304.777.594
		J U M L A H	Rp.594.897.594

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Kepala Bidang Ketahanan Seni,Budaya
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Yustina SKM. M.Likg
NIP.19790522 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wardaniah, A.Md**

Jabatan : Alanis Kebijakan Muda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yustina. SKM, M.Ling**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Yustina, SKM, M.Ling
NIP.19671102 199303 1 010

Pihak Pertama

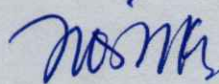
Wardaniah, A.Md
NIP.19660723 198602 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	BUTIR KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai SKPD	Jumlah penyusunan Rencana Kerja	39 Laporan
2	Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat daerah;	Mengumpulkan Issu2 Kebijakan	7 Laporan
3	Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan;	Pemetaan Masalah	17 Laporan
4	Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan;	Informasi yang berkembang	41 Laporan
5	Monitoring dan Evaluasi kebijakan;	Jumlah kegiatan	75 Laporan
6	Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh;	Jumlah Data dan Informasi	100 Laporan
7	Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan;	Jumlah data dan informasi	32 Laporan
8	Menganalisis permasalahan kebijakan;	Sengketa masalah	5 Laporan
9	Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);	Draft Telalaahan Staf	31 Draft
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegaitan	360 Laporan

NO	SASARAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	APBD

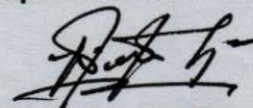
Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut



Yustina, SKM. M.Ling
NIP.19640671 198602 1 005

Pelaihari, 06 Januari 2023

Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut



Wardaniah, A. Md
NIP.19660723 198602 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Emiliani Saudah, SE**

Jabatan : Analis Kerjasama Kebudayaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yustina, SKM, M. Ling**

Jabatan : Kepala Bidang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 18 Januari 2023

Pihak Kedua

Yustina, SKM. M. Ling
NIP.19790522 199803 2 002

Pihak Pertama

Emiliani Saudah, SE
NIP.19710626 199003 2 001

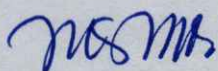
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	12 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Analis Kerjasama Kebudayaan dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah dokumen hasil analisa	4 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Kerjasama Kebudayaan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Jumlah laporan hasil penelitian	12 Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	10 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	5 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	20 Laporan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	APBD

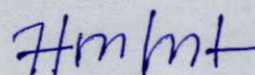
Pelaihari, 18 Januari 2023

**Kepala Bidang Ketahanan Seni,Budaya
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**



Yustina , SKM, M.Ling
NIP.19790522 199803 2 002

**Analisis Kerjasama Kebudayaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**



Emiliani Saudah, SE
NIP.19710626 1990032 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. M Daud**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

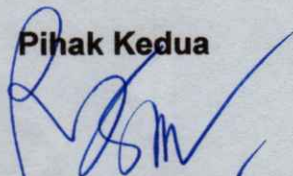
Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

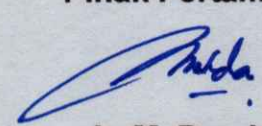
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Pihak Pertama


Ir. M. Daud
NIP.19671102 199303 1 010

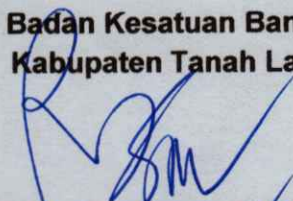
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilaitasi Penanganan Konflik	100 %

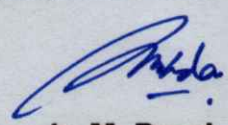
	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;	
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 268.615.645
		2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 22.295.000
		3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 467.000.000
		Jumlah	Rp. 757.910.645

Pelaihari, 06 Januari 2023

**Pft.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**


Ir. M. Daud
NIP.19671102 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdillah, M. Pd**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**

Jabatan : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 25 Januari 2023

Pihak Kedua

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Pihak Pertama

Abdillah, M. Pd
NIP.19690910 199103 1 011

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilaitasi Penanganan Konflik	100 %

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;	
		5. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 3.500.000.000
		6. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 268.615.645
		7. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 21.402.500
		8. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 467.000.000
		J u m l a h	Rp.4.257.108.145

Pelaihari, 25 Januari 2023

**Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**

Abdillah, M. Pd
NIP.19690910 199103 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Kamaruzzaman**

Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mohamamad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut**

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 07 Juni 2023

Pihak Kedua

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama

Drs. H. Kamaruzzaman
NIP. 19670803 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100 %

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;	
		1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 0
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 210.375.545
		3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 18.297.500
		4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 441.650.000
		J u m l a h	Rp. 670.323.045

Pelaihari, 07 Juni 2023

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

**Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut**

Drs. H. Kamaruzzaman
NIP. 19670803 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Kamaruzzaman**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mohamamad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama

Drs. H. Kamaruzzaman
NIP. 19670803 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilaitasi Penanganan Konflik	100 %

	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;	
		1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 0
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 218.375.345
		3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 18.297.500
		4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 441.650.000
		J u m l a h	Rp. 678.323.845

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Kamaruzzaman
NIP. 19670803 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Kamaruzzaman**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Muda**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. M. Daud**

Jabatan : **Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Ir. M. Daud
NIP.19671102 199303 1 010

Pihak Pertama

Drs. H. Kamaruzzaman
NIP.196708031993031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	BUTIR KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai SKPD	Jumlah penyusunan Rencana Kerja	2 Laporan
2	Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat daerah;	Mengumpulkan Issue2 Kebijakan	60 Laporan
3	Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan;	Pemetaan Masalah	48 Laporan
4	Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan;	Informasi yang berkembang	60 Laporan
5	Monitoring dan Evaluasi kebijakan;	Jumlah kegiatan	72 Laporan
6	Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh;	Jumlah Data dan Informasi	36 Laporan
7	Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan;	Jumlah data dan informasi	36 Laporan
8	Menganalisis permasalahan kebijakan;	Sengketa masalah	36 Laporan
9	Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);	Draft Telalaahan Staf	24 Draft
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegaitan	120 Laporan
11	Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, Advakasi pendampingan dengan Instansi terkait	Jumlah Laporan	120 Laporan

NO	SASARAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terlaksananya Koordinator di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinator di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	APBD

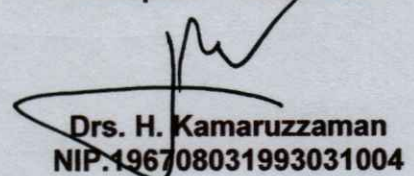
Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabuapeten Tanah Laut



Ir. M. Daud
NIP.19671102 199303 1 010

Analisis Kebjiakan MUda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Kamaruzzaman
NIP.196708031993031004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wardana, SE**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Muda**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. M. Daud**

Jabatan : **Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 6 Januari 2023

Pihak Kedua

Ir. M. Daud

NIP.19671102 199303 1 010

Pihak Pertama

Wardana, SE

NIP.19730310 199403 1 011

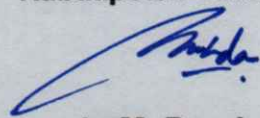
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	BUTIR KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai SKPD	Jumlah penyusunan Rencana Kerja	64 Laporan
2	Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat daerah;	Mengumpulkan Issue2 Kebijakan	68 Laporan
3	Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan;	Pemetaan Masalah	36 Laporan
4	Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan;	Informasi yang berkembang	80 Laporan
5	Monitoring dan Evaluasi kebijakan;	Jumlah kegiatan	34 Laporan
6	Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh;	Jumlah Data dan Informasi	29 Laporan
7	Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan;	Jumlah data dan informasi	33 Laporan
8	Menganalisis permasalahan kebijakan;	Sengketa masalah	89 Laporan
9	Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);	Draft Telalaahan Staf	34 Draft
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegaitan	103 Laporan

NO	SASARAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	APBD

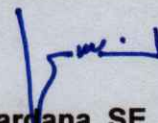
Pelaihari, 06 Januari 20232

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Ir. M. Daud
NIP.19671102 199303 1 010

Asalis Kebijakan Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Wardana. SE
NIP.19730310 199403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **Devi Wulandari, S.AB**

Jabatan : Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pada Bidang Kewaspadaan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. M. Daud**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua

Ir. H. M. Daud
NIP.19671102 199303 1 010

Pihak Pertama

Devi Wulandari, S.AB
NIP.19950422 202012 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	12 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil analisa	12 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian	12 Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	4 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	12 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	4 Laporan

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	ABPD

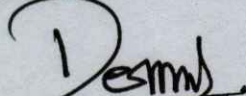
Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. M. Daud
NIP. NIP.19671102 199303 1 010

Analisis Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Devi Wulandari, S.SB
NIP.19950422 202012 2 0024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ikhsan Cahyadi, S.Kom**

Jabatan : Pranata Komputer Mahir

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Mohammad Syahid, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

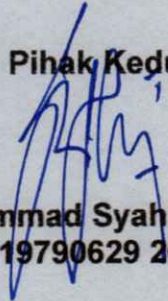
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

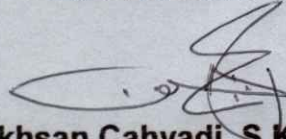
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 27 September 2023

Pihak Kedua


Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Pihak Pertama


Ikhsan Cahyadi, S.Kom
NIP.19770614 201001 1 009

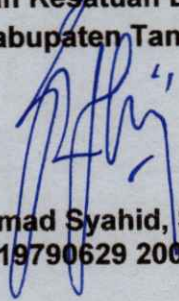
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Butir Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Membuat laporan operasi komputer;	Jumlah laporan operasi komputer;	30 Laporan
2	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;	Jumlah dokumen hasil dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;	30 Dokumen
3	Melakukan penggandaan Data dan atau Program;	Jumlah file penggandaan data dan atau program;	50 File
4	Membuat laporan hasil perekaman data;	Jumlah laporan hasil perekaman data;	50 Laporan
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain;	30 Laporan

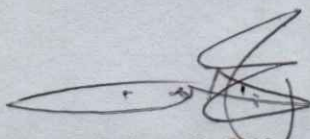
No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya semua administrasi Pelaporan;	Penggunaan teknologi informasi terus dilakukan sehingga tata kelola administrasi Pelaporan dapat di selenggarakan secara efektif dan efisien.	APBD

Pelaihari, 27 September 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

Fungsional Tertentu
Pranata Komputer Mahir
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Ikhsan Cahyadi, S.Kom
NIP. 19770614 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suwardi, A.Md.Kom**

Jabatan : Pengolah Data

Sub Bidang Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Abdillah, M. Pd**

Jabatan : Kepala Bidang Wawasan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 18 Januari 2023

Pihak Kedua

Abdillah, M.Pd

NIP. 19690910 199103 1 011

Pihak Pertama

Suwardi, A.Md.Kom

NIP.19730402 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data dan penyajian data	Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk yang dipelajari	48 Dokumen
2	Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan-bahan kegiatan berdasarkan jenis data pelayanan untuk disajikan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan data	24 Laporan
3	Menganalisis data dan penyajian data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk	Jumlah dokumen hasil analisis data	24 Dokumen
4	Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data dan penyajian data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan di olah	Jumlah dokumen hasil rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data dan penyajian data	24 Dokumen
5	Mencatat perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya	Jumlah dokumen perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik	72 Dokumen
6	Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	24 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan	24 Laporan
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	360 Laporan

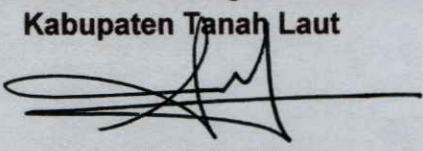
No	Sub Kegiatan	Pelaksana	Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan Penyusunan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	ABPD

Pelaihari, 18 Januari 2023

Kepala Bidang Wawasan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Adbillah, M. Pd
NIP. 19690910 199103 1 011

Pengolah Data
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Suwardi, A.Md.Kom
NIP. 19730402 201001 1 001

CASCADING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT					
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT					
TUJUAN - TERJAGANYA STABILITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT					
Indikator : Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani					
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	KEPALA BIDANG POLITIK	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	SEKRETARIS	
Sasaran 1 - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Indikator : 1.1 Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	Sasaran 2 - Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Indikator : 2.1 Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Sasaran 3 - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Indikator : 3.1 Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	Sasaran 4 - Meningkatkan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Masyarakat 4.1 Persentase Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat di Kabupaten Sasaran 5 - Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator : 5.2 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sasaran 6 - Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD 6.1 Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan Kepegawaian 6.2 Persentase perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 6.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	
				KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				6.4 Melaksanakan pengusunan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD 6.4.1 Dokumen Kinerja sesuai ketentuan 6.5 Mengusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD 6.5.1 Dokumen Pelaporan yang disusun 6.5.2 Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	6.6 Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran 6.6.1 Aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol Kab. Tanah Laut 6.7 Mengiapkan data kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian 6.7.1 Dokumentasi Data dan Layanan surat menurut 6.7.2 Pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilakukan secara tertib 6.8 Menginventarisir Peningkatan Kapasitas SDM 6.8.1 ASM yang mengikuti Pelatihan/Bimtek

LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : MARET 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	3.999.825	2.685.210	-	2.685.210	67%	67%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	SILPA	4.494.800	760.000	-	760.000	20%	17%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.292.625.922	-	794.379.130	794.379.130	25%	15%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	4.999.352	1.893.658	-	1.893.658	40%	38%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	-	SILPA	2.609.476	-	-	-	0%	0%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	5 Paket	SILPA	74.774.344	42.690.950		42.690.950	60%	57%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	-	SILPA	5.211.704	-	-	-	0%	0%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 Paket	SILPA	14.572.830	725.200	-	725.200	10%	5%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	300.000	-	300.000	30%	25%	
8 01 01 2.06 09	6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	20 Laporan	SILPA	82.375.000	38.125.000	-	38.125.000	50%	46%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.07 05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	85%	
8 01 01 2.07 06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86%	
8 01 01 2.07 11	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	1 Unit	-	SILPA	139.140.316	-	-	-	0%	0%	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	SILPA	72.600.000	10.427.652	-	10.427.652	20%	14%	
8 01 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	3 Laporan	SILPA	179.392.488	35.849.543	-	35.849.543	25%	20%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln		SILPA	23.925.000	-	-	-	0%	0%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	16 Unit	3 Unit	SILPA	83.395.500	2.022.750	-	2.022.750	8%	2%	
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	2 Unit	SILPA	15.000.000	1.400.000	-	1.400.000	10%	9%	
8 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	-	SILPA	206.964.828	-	-	-	0%	0%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan											
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 orang	-	SILPA	76.629.520	-	-	-	0%	0%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 02 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	113 orang	20 org	SILPA	1.157.195.811	45.467.000	-	45.467.000	10%	3,9%	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Pemilu/ Pilkada	11 Kecamatan	3 Kecamatan	SILPA	1.529.698.397	15.837.500		15.837.500	25%	1,0%	
		Jumlah Parpol yg Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol									
		Jumlah Sekolah yang dilakukan Sosialisasi Tentang Memilih Pemula	11 Sekolah									

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 03 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	11 Desa		SILPA	13.999.306	2.640.000		2.640.000	19%	19%	
8 01 03 2.01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	10 Kecamatan		SILPA	4.999.648	270.000		270.000	10%	5%	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	-	SILPA	290.120.000	-		-	0%	0%	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	228 Orang									

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1880 Orang	200 orang	SILPA	245.456.776	11.302.440	-	11.302.440	10,6%	5%	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	SILPA	268.615.645	28.125.000		28.125.000	10%	10%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pelaksanaan Rapat	20 Kali	1 kali							
		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	3 bulan							
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	-	SILPA	22.295.000	3.477.500	-	3.477.500	16%	16%
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		8 Dokumen	-	SILPA	467.000.000	-	-	-	0%	0%
						10.321.730.790	277.611.653	794.379.130	1.071.990.783		10,39%

Pelaksanaan 04 April 2023
Pit. KEPALA BADAN,
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 199010 1 001

LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : JUNI 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					6.245.720.687			2.673.302.350		42,80%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan					8.494.625			4.971.760		58,53%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	3.999.825	2.685.210	-	2.685.210	67%	67%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	SILPA	4.494.800	2.286.550	-	2.286.550	66%	51%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan					5.297.625.274			2.398.401.029		45,27%	
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	6 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.292.625.922	-	2.395.819.371	2.395.819.371	58%	45%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	4.999.352	2.581.658	-	2.581.658	52%	52%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.759.000			16.900.000		###	
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					180.743.354			117.699.147		65,12%	
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	7 Paket	SILPA	2.609.476	2.309.500	-	2.309.500	100%	89%	

8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	6 Paket	SILPA	74.774.344	54.058.907		54.058.907	80%	72%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	2 Paket	SILPA	5.211.704	3.919.240	-	3.919.240	100%	75%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	2 Paket	SILPA	14.572.830	2.807.000	-	2.807.000	20%	19%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	600.000	-	600.000	50%	50%	
8 01 01 2.06 09	6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30 Laporan	SILPA	82.375.000	54.004.500	-	54.004.500	70%	66%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					158.820.618			23.501.250		14,80%	
8 01 01 2.07 05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	85%	
8 01 01 2.07 06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86%	
8 01 01 2.07 11	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	1 Unit	-	SILPA	139.140.316	6.789.000	-	6.789.000	10%	5%	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang					251.992.488			91.945.914		36,49%	
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	5 Laporan	SILPA	72.600.000	18.781.963	-	18.781.963	50%	26%	
8 01 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	6 Laporan	SILPA	179.392.488	73.163.951	-	73.163.951	50%	41%	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik					329.285.328			19.883.250		6,04%	

8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit	SILPA	23.925.000	2.235.750	-	2.235.750	15%	9%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	4 Unit	SILPA	83.395.500	16.247.500	-	16.247.500	40%	19%	
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	2 Unit	SILPA	15.000.000	1.400.000	-	1.400.000	10%	9%	
8 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	-	SILPA	206.964.828	-	-	-	0%	0%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					1.233.825.331			114.461.800		9,28%	
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 orang	-	SILPA	76.629.520	-	-	-	0%	0%	
8 01 02 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	113 orang	20 org	SILPA	1.157.195.811	114.461.800	-	114.461.800	20%	9,9%	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijan Teknis dan					1.548.697.351			1.500.671.050		96,90%	

8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Pemilu/ Pilkada	11 Kecamatan	3 Kecamatan	SILPA	1.529.698.397	29.317.500	1.464.698.550	1.494.016.050	98%	97,7%	
		Jumlah Parpol yg Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	10 Parpol								
		Jumlah Sekolah yang dilakukan Sosialisasi Tentang Pilih Pemula	11 Sekolah	5 sekolah								
8 01 03 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	11 Desa	2 desa	SILPA	13.999.306	5.140.000		5.140.000	37%	37%	
8 01 03 2.01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	10 Kecamatan	1 kec	SILPA	4.999.648	1.515.000		1.515.000	30%	30%	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					290.120.000			146.050.000		50,34%	
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	3 badan/ lembaga orms	SILPA	290.120.000	1.050.000	145.000.000	146.050.000	60%	50%	

8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Hibah SPN Polda Kalsel	1 Hibah SPN Polda Kalsel	SILPA	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	100%	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	SILPA	268.615.645	93.840.100		93.840.100	40%	35%	
		Jumlah Pelaksanaan Rapat	20 Kali	2 kali								
		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan	-								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	5 bulan								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	1 laporan	SILPA	22.295.000	4.747.500	-	4.747.500	25%	21%	

8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	467.000.000	45.650.000	-	45.650.000	25%	10%	
						13.821.730.790	624.699.459	7.627.967.921	8.252.667.380		59,71%	

Pelaihari, 03 Juli 2023

KEPALA BADAN,

M. SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004



LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : SEPTEMBER 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					6.245.720.687			3.902.031.629		62,48%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan					8.494.625			4.971.760		58,53%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	3.999.825	2.685.210	-	2.685.210	67%	67%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	SILPA	4.494.800	2.286.550	-	2.286.550	66%	51%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan					5.297.625.274			3.368.014.156		63,58%	
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.292.625.922	-	3.365.432.498	3.365.432.498	80%	64%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	4.999.352	2.581.658	-	2.581.658	52%	52%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.759.000			16.900.000		90,09%	
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					180.743.354			147.706.207		81,72%	
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	7 Paket	SILPA	2.609.476	2.309.500	-	2.309.500	100%	89%	

8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	SILPA	74.774.344	60.113.537		60.113.537	100%	80%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	2 Paket	SILPA	5.211.704	3.919.240	-	3.919.240	100%	75%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	SILPA	14.572.830	6.923.310	-	6.923.310	50%	48%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	900.000	-	900.000	75%	75%	
8 01 01 2.06 09	6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	43 Laporan	SILPA	82.375.000	73.540.620	-	73.540.620	93%	89%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					158.820.618			141.261.250		88,94%	
8 01 01 2.07 05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	85%	
8 01 01 2.07 06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86%	
8 01 01 2.07 11	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	SILPA	139.140.316	6.789.000	117.760.000	124.549.000	100%	90%	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang					251.992.488			139.096.864		55,20%	
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	9 Laporan	SILPA	72.600.000	29.350.937	-	29.350.937	70%	40%	
8 01 01 2.08 04	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	9 Laporan	SILPA	179.392.488	109.745.927	-	109.745.927	75%	61%	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik					329.285.328			84.081.392		25,53%	

8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit/9 bln	SILPA	23.925.000	16.750.150	-	16.750.150	75%	70%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	10 Unit	SILPA	83.395.500	38.116.242	-	38.116.242	60%	46%	
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	12 Unit	SILPA	15.000.000	7.615.000	-	7.615.000	55%	51%	
8 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	SILPA	206.964.828	21.600.000	-	21.600.000	20%	10%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					1.233.825.331			612.843.550		49,67%	
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	861 orang	-	SILPA	76.629.520	13.970.000	-	13.970.000	20%	18%	
8 01 02 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	113 orang	20 org	SILPA	1.157.195.811	598.873.550	-	598.873.550	55%	51,8%	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijan Teknis dan					1.548.697.351			1.523.001.050		98,34%	

8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Pemilu/ Pilkada	11 Kecamatan	7 Kecamatan	SILPA	1.529.698.397	50.082.500	1.464.698.550	1.514.781.050	99%	99,0%	
		Jumlah Parpol yg Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	10 Parpol								
		Jumlah Sekolah yang dilakukan Sosialisasi Tentang Pilih Pemula	11 Sekolah	11 sekolah								
8 01 03 2.01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	11 Desa	4 desa	SILPA	13.999.306	5.140.000		5.140.000	37%	37%	
8 01 03 2.01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	10 Kecamatan	6 kec	SILPA	4.999.648	3.080.000		3.080.000	62%	62%	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan					290.120.000			181.700.000		62,63%	
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	4 badan/ lembaga orms	SILPA	290.120.000	1.700.000	180.000.000	181.700.000	80%	63%	

8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Hibah SPN Polda Kalsel	1 Hibah SPN Polda Kalsel	SILPA	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	100%	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	SILPA	268.615.645	159.532.540		159.532.540	63%	59%	
		Jumlah Pelaksanaan Rapat	20 Kali	2 kali								
		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan	-								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	5 bulan								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	1 laporan	SILPA	22.295.000	9.400.000	-	9.400.000	50%	42%	

8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	4 Dokumen	SILPA	467.000.000	308.924.229	-	308.924.229	75%	66%	
						13.821.730.790	1.653.129.460	8.750.341.048	10.403.470.508		75,27%	



Pelaihari, 02 Oktober 2023

KEPALA BADAN,

M. SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

(060 117.1)

LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : DESEMBER 2023

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						6.580.257.799	960.286.578	4.372.348.172	5.601.651.250		85,13%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi					8.494.625	5.371.760		5.371.760		63,24%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	SILPA	3.999.825	3.085.210	-	3.085.210	100%	77,13%	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	SILPA	4.494.800	2.286.550	-	2.286.550	100%	50,87%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.197.625.274	2.931.658	4.372.348.172	4.375.279.830		84,18%	
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.192.625.922	-	4.372.348.172	4.372.348.172	100%	84,20%	
8 01 01 2.02 03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	SILPA	4.999.352	2.931.658	-	2.931.658	100%	58,64%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	SILPA	18.759.000	16.900.000	-	16.900.000	100%	90,09%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										91,21%	
						419.535.348	382.667.983		382.667.983			
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Paket	7 Paket	SILPA	2.609.476	2.309.500	-	2.309.500	100%	88,50%	
8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	11 Paket	SILPA	128.585.498	102.622.537		102.622.537	100%	79,81%	
8 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	2 Paket	2 Paket	SILPA	5.211.704	3.919.240	-	3.919.240	100%	75,20%	
8 01 01 2.06 05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	SILPA	14.572.830	14.546.940	-	14.546.940	100%	99,82%	
8 01 01 2.06 06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yg disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	SILPA	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	100%	100,00%	

8	01	01	2.06	07	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang disediakan	1 Paket'	1 Paket'	SILPA	9.980.840	9.763.400	-	9.763.400	100%	97,82%	
8	01	01	2.06	09	6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	85 Laporan	SILPA	257.375.000	248.306.366	-	248.306.366	100%	96,48%	
8	01	01	2.07								358.624.250	204.305.250		322.065.250		89,81%	
8	01	01	2.07	05	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	6 Unit	6 Unit	SILPA	16.385.544	13.870.250	-	13.870.250	100%	84,65%	
8	01	01	2.07	06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	1 Unit	1 Unit	SILPA	3.294.758	2.842.000	-	2.842.000	100%	86,26%	
8	01	01	2.07	11	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	SILPA	338.943.948	187.593.000	117.760.000	305.353.000	100%	90,09%	
8	01	01	2.08								223.066.488	189.613.011		189.613.011		85,00%	
8	01	01	2.08	02	1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	SILPA	75.000.000	43.237.972	-	43.237.972	100%	57,65%	
8	01	01	2.08	04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	12 Laporan	SILPA	148.066.488	146.375.039	-	146.375.039	100%	98,86%	
8	01	01	2.09								354.152.814	158.496.916		309.753.416	95,25%	87,46%	
8	01	01	2.09	01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit/ 12 bln	SILPA	27.925.000	23.993.150	-	23.993.150	95%	85,92%	
8	01	01	2.09	02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	SILPA	104.395.500	89.905.766	-	89.905.766	95%	86,12%	
8	01	01	2.09	06	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	21 Unit	SILPA	15.000.000	12.265.000	-	12.265.000	91%	81,77%	
8	01	01	2.09	09	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	SILPA	206.832.314	32.333.000	151.256.500	183.589.500	100%	88,76%	
8	01	02															
8	01	02															
8	01	02	2.01								1.313.822.756	1.177.829.234		1.177.829.234		89,65%	

[illegible]

8	01	04	2.01	03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Badan, Lembaga, Ormas yang menerima Hibah	5 Badan/ Lembaga/ Ormas	5 badan/ lembaga orms	SILPA	290.120.000	3.485.000	285.000.000	288.485.000	100%	99,44%	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	228 Orang	228 Orang								
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN											
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan											
8	01	05	2.01	03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1925 Orang	1925 Orang	SILPA	304.777.594	153.496.440	122.450.000	275.946.440	100,0%	90,54%	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN											
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan					4.265.910.445	674.778.959	3.500.000.000	4.174.778.959		97,86%	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1 Hibah SPN Polda Kalsel	1 Hibah SPN Polda Kalsel	SILPA	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	100,00%	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Keembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	165 orang	SILPA	276.615.445	260.827.480		260.827.480	95%	94,29%	
						Jumlah Pelaksanaan Rapat	10 Kali	6 Kali								

		Jumlah Pembayaran Honor FKDM	6 Bulan	5 Bulan								
		Jumlah Pembayaran Honor TNI AL	10 Bulan	10 bulan								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Berbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	SILPA	22.295.000	15.748.750	-	15.748.750	90%	70,64%	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	SILPA	467.000.000	398.202.729	-	398.202.729	100%	85,27%	
						57.990.647.363	3.115.186.011	53.359.048.722	56.743.251.233	99,95%	97,85%	



Monitoring dan Evaluasi
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					REALISASI KINERJA TAHUN KE				
								2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10					
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	1.	Persentase tingkatkerukunan antar umat beragama	1.	Meningkatnya toleransidan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik interndan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0	2	3	0	0	3
				2	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	2	Jumlah konflik sosial(kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		1.	Meningkatnya Pendidikan Politik	1.	Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan Politik	1	Jumlah monitoring, evaluasi peningkatan demokrasi fasilitasi Kelembagaan pemilihan umum	70%	75%	75%	0	0	79%	75%	48,47%	0	0
					Jumlah Parpol penerima Bantuan Keuangan (hibah Parpol)	2	Pelaksaan pemberian bantuan keuangan (hibah Parpol) sesuai ketentuan yang berlaku	2	Persentase Parpol yang menerima Bantuan Keuanganyang memenuhi Persyaratan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Pembinaan terhadap Ormas/LSM / OKP, Mahasiswa dan Pelajar	1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan Narkobadan Pekat	1	Persentase Pembinaan terhadap Ormas /LSM/ OKP, Mahasiswa dan Pelajar.	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	30%
		2	Jumlah Dana HibahOrmas / LSM	2	Meningkatnya JumlahPemohon	2	Jumlah Ormas / LSMyang memohon	0	3	4	4	4	0	3	3	3	5

		3	Jumlah lembaga ke Agamaan yang aktif dalam meningkatkan Produktivitas umat (Lembaga)	3	Meningkatnya ketahananSeni budaya, agama, kemasyarakatan dan Ekonomi	3	Terlaksananya Organisasi / lembaga kemasyarakatan yangaktif	15	20	25	30	40	0	20	16	10	13
		4	Jumlah Desa Peduli Toleransi	4	Meningkatnya Kerukunan / keharmonisan antarumat beragama	4	Jumlah furom antar umat beragama/ lembaga agama yangaktif	0	1	1	2	3	1	1	1	1	1
2	Terwujutnya tatanan nilai-nilai kewaspadaandini bagi masyarakat	1	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dalam hal mendeteksi ATHGd Daerah	1	Meningkatkan peran forum Kewaspadaan Dini(FKDM)	1	Persentase forum konflik KewaspadaanDini dan Tim Kewaspadaan Dini yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Cakupan pengawasanorang asing dan lembaga asing Kabupaten (%)	2	Meningkatnya pengawasan orangasing dan lembagaasing	2	Persentase pengendalian dan pengawasan orangAsing dan lembagaasing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jumlah Desa Sadar Penyelesaian konflik (desa)	3	Meningkatkan Penanganan Pengaduan Konflik	3	Meningkatkan kapabilitas cegah dantangkal dini serta penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat	0	0	1	2	4	1	0	4	2	2
	Persentase FasilitasiFurom Pembauran	1	Persentase Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1	Meningkatnya kesadaranPembauran masyarakat dalam berkebangsaan	1	Persentase kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Kebhenika Tunggal Ika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,01 %	9,09%
		2	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaanbagi Pemuda, Remaja usia sekolah (%) Kelempok Masyarakat / LSM.	2	Meningkatkan wawasan kebangsaan di tengah- tengah kehidupan bermasyarakat	2	Jumlah kelompok masyarakat /LSM organisasi pemudayang aktif berorganisasi	7	10	12	15	20	0	10	12	10	13

		3	Jumlah Desa multietnis (Multikulturalisme)	3	Meningkatnya kerukunan / keharmonisan antar umat beragama dalam kebangsaan	3	Menciptakan stabilitas / ketentraman masyarakat antar suku/Etnis	0	1 Desa (8 suku)	1	0	0	0	1	1	1	1
3	Terwujutnya kualitas tatakelola administrasi yang tertib efektif dan efisien	1	Menerapkan SOP untuk administrasi di SOPD	1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	1	Indek Kepuasan Masyarakat	71	71.5	72	72,5	73,43	76,78	76,80	85,98	86,92	88,31
		2	Meningkatkan tertib administrasi	2	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan	2	Nilai SAKIP SKPD	B	B	B	B	B	BB	B	B	BB	B
		3	Menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang	3	Meningkatnya tatakelola sistem perkantoran	3	Persentase tata kelola yang dipenuhisuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,79%	100%

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

TABEL KESELARASAN

NO	LAPKIN 2023						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			Cascading 2023		Pemilik
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegisitas dalam penyelenggara an pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	100%	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegisitas dalam penyelenggara an pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	100%	Meningkatnya Keteraturan dan Keterbacaan Masyarakat (tantribmas) dalam berpolitik	Persentase Kesadaran akan norma dan ketertarikan berpolitik	100%	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakatyang tertangani	100%	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakatyang tertangani	Kepala Badan
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	100%		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dalam hal mendeteksi ATHG di Daerah	100%	Meningkatkan peran forum kewaspadaan dini (FKDM)	Persentase Forum konflik kewaspadaan Dini dan Tim Kewaspadaan Dini yang aktif	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya koordinasi dan Fasilitas Penanganan Konflik	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
								Cakupan Pengawasan orang asing dan lembaga asing Kabupaten	100%	Terlaksananya Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	100%						
		Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	100%		Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	100%	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	Kepala Bidang Politik
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	75%	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam berpolitik	75%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	Kepala Bidang Ketahanan
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	Kepala Bidang Ketahanan
		Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%		Persentase Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	100%	Meningkatnya Kesadaran Pembaruan masyarakat dalam kebangsaan	Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Kebhineka Tinggal Ikan	450	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase PembinaanForum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase PembinaanForum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan
								Cakupan Pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah	15	Meningkatkan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat	Jumlah kelompok masyarakat/LSM organisasi pemuda yang aktif berorganisasi	15						Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan
	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi yang tertib efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	Peningkatan Akuntabilitas KinerjaSKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	Sekretaris
					Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Sekretaris
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	B		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	B		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	Sekretaris
				Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	7 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	7 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Kasubag Peren&Keu
					Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Dok	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Dok		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	Kasubag Peren&Keu

				Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	28 Orang		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dok		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dok	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	28 Orang	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangan	Kasubbag Peren&Keu
				Menyiapkan Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi data dan layanan surat menyurat	12 Dokumen	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	Menyiapkan Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi data dan layanan surat menyurat	12 Dokumen	Menyiapkan Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi data dan layanan surat menyurat	Kasubbag Umum & Kepegawaian
				Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol	4 Laporan	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran pemenuhan, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran pemenuhan, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol	4 Laporan	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol	Kasubbag Umum & Kepegawaian
				Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	1 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	1 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kasubbag Umum & Kepegawaian



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 19750629 200603 1 004